



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.442, 2011

**BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL. Rencana Strategis. Tahun 2010-2014.**

**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA
STRATEGIS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TAHUN 2010 - 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung program prioritas nasional di bidang penanaman modal, maka diperlukan penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2010 - 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2010 - 2014;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4664);
 4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011;
 5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
 7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 tahun 2011;
 8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2010 - 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2010 - 2014.

Pasal I

Lampiran Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2010 - 2014 diubah sebagaimana Lampiran yang tercantum dalam Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2011
KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

BAB I

PENDAHULUAN

Pengembangan “iklim investasi dan iklim usaha” yang kondusif merupakan salah satu prioritas dari prioritas nasional dan prioritas bidang lainnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Ada tiga pokok telaahan untuk memahami pentingnya perhatian terhadap isu-isu tersebut.

Pertama, sektor penanaman modal semakin dibutuhkan perannya untuk menggerakkan laju perekonomian sebagai kelanjutan dari kinerja yang telah dicapai dalam periode lima tahun sebelumnya. Pengembangan kegiatan penanaman modal tidak saja ditujukan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, melainkan juga diarahkan untuk dapat menjawab tantangan persoalan-persoalan mendasar, seperti pengembangan sektor strategis dan komoditas unggulan, reindustrialisasi, pemerataan penanaman modal, serta penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Dalam lima tahun terakhir, pangsa penanaman modal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat secara signifikan dari 22,45 persen pada 2004 menjadi 28,12 persen pada 2008. Namun, peningkatan PDB tersebut masih belum mengatasi ketimpangan secara kewilayahan dan sektoral, dimana sekitar 82 persen jumlah proyek penanaman modal berada di Jawa dengan konsentrasi sekitar 95 persen pada sektor sekunder dan tersier.

Kedua, dalam percaturan global, iklim penanaman modal dan iklim usaha yang ditandai dengan tingkat daya saing nasional terbilang masih rendah. Laporan *Global Competitiveness Report 2009-2010* yang diterbitkan *World Economic Forum* (WEF) menempatkan Indonesia pada peringkat 54 dari 133 negara yang disurvei. Angka ini sedikit meningkat dibanding tahun 2008-2009 yang berada pada peringkat 55. Bandingkan dengan negara-negara sekawasan seperti Singapura (peringkat 3), Malaysia (peringkat 24), Thailand (peringkat 36), dan China (peringkat 29). Sementara peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business*) terbitan *World Bank* (2009) menempatkan Indonesia pada peringkat 122 dari 189 negara yang disurvei. Posisi Indonesia ini jauh di bawah negara-negara sekawasan, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Laporan *International Institute for Management Development* (IMD) dalam *World Competitiveness Yearbook 2009* menyatakan daya saing Indonesia menempati peringkat 42 dari 57 negara, meningkat cukup tajam dibanding 2008 yang peringkat 51 dari 55 negara.

Ketiga, tantangan ketidakpastian perekonomian global dalam lima tahun ke depan membawa dampak persaingan yang semakin ketat dalam mendapatkan dana internasional, khususnya penanaman modal langsung. Fenomena masih berlanjutnya kebangkrutan banyak lembaga keuangan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris pada 2009, sementara upaya pemulihan pasca krisis keuangan global terus dilakukan oleh otoritas setempat, menandakan bahwa iklim ekonomi dunia masih akan dihadapkan pada kekurangan likuiditas dalam beberapa tahun mendatang. Tendensi kebijakan penguatan ekonomi domestik di negara-negara maju sebagai strategi pemulihan akan berakibat pada berkurangnya aliran global. Data *World Bank* menyebutkan, aliran modal keluar (*merger* dan akuisisi) dari negara-negara maju (*Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD countries*) ke negara-negara berkembang (*non-OECD countries*) menyusut sekitar 28 persen pada 2008. Sementara lembaga dunia seperti *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* menyatakan bahwa akibat krisis keuangan global seluruh sektor terkena dampaknya, kecuali minyak bumi, pertambangan, dan pangan (*agri-food business*).

Dalam situasi seperti diuraikan di atas, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dihadapkan pada tuntutan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. Arah peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha sesuai prioritas nasional membawa pesan perlunya peningkatan kualitas tatakelola dan kinerja BKPM (internal) dan hubungan antar lembaga (eksternal). Lebih jauh RPJMN 2010-2014 mengamanatkan kegiatan prioritas nasional dan prioritas bidang dalam lingkup penanaman modal yang erat kaitannya dengan upaya peningkatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar-kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda). Kegiatan prioritas dimaksud meliputi: kegiatan peningkatan deregulasi kebijakan penanaman modal, peningkatan aspek kebijakan penanaman modal, Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), implementasi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal, dan pengembangan penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sementara prioritas bidang menyangkut peningkatan harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan perizinan dan non perizinan serta peningkatan fasilitas.

Agenda lima tahun ke depan yang dihadapi BKPM tersebut di atas disadari bukanlah tugas yang ringan, mengingat implementasi tugas koordinasi antar-K/L dan daerah sejauh ini disadari belum sepenuhnya berjalan. Meski demikian, dengan tekad dan kerja keras oleh segenap pemangku kepentingan,

semua persoalan sesungguhnya dapat diatasi. Kinerja BKPM dalam periode 2005-2009 telah membuktikan capaian yang cukup menggembirakan, baik dari sisi kelembagaan maupun target-target penanaman modal.

Visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) BKPM 2010-2014 merupakan penjabaran dari RPJMN 2010-2014 di bidang penanaman modal dengan mempertimbangkan capaian dan evaluasi Renstra 2005-2009 serta pencapaian target realisasi penanaman modal pada tahun 2010.

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Rencana Strategis 2005-2009

Peningkatan pangsa terhadap pembentukan PDB dalam periode RPJMN tahun 2005-2009 tidak lepas dari capaian kinerja BKPM dalam melaksanakan Renstra 2005-2009. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Di samping itu, kinerja BKPM telah memberikan kontribusi cukup berarti bagi penanganan isu-isu perekonomian nasional, seperti peningkatan daya saing dan pembukaan lapangan kerja. Beberapa indikator kinerja yang telah dicapai BKPM dalam periode tahun 2005-2009 diuraikan sebagai berikut:

Pertama, peningkatan iklim penanaman modal, yang salah satu indikatornya terlihat dari perbaikan peringkat Indonesia dalam survei *Doing Business*, dan peningkatan kerja sama penanaman modal, baik secara bilateral, regional, dan multilateral.

Kedua, peningkatan pelayanan penanaman modal, melalui penyederhanaan mekanisme pemberian pelayanan penanaman modal, dari yang kurang efisien menjadi sederhana, efisien, dan berorientasi bisnis atau probisnis.

Ketiga, peningkatan promosi penanaman modal dengan menyelenggarakan promosi yang lebih fokus, terarah dan terintegrasi melalui berbagai kegiatan, antara lain *marketing* penanaman modal Indonesia, *rebranding* dan *repositioning*, seminar penanaman modal, temu usaha, pameran potensi penanaman modal daerah dan menyelenggarakan promosi penanaman modal di luar negeri.

Keempat, penguatan kelembagaan, sebagai aspek fundamental yang menentukan tingkat keberhasilan langkah-langkah inisiasi, proses, implementasi, kontrol, dan evaluasi dari berbagai entitas organisasi.

Kelima, reformasi birokrasi yang telah menjadi tekad dan target BKPM untuk dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, yang dilakukan melalui program reformasi birokrasi.

Keenam, reformasi laporan keuangan, yang terlihat dari peningkatan opini atas laporan keuangan BKPM tahun 2008, dengan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lebih lanjut berikut ini diuraikan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan BKPM selama tahun 2005-2009, serta aspirasi masyarakat berkait dengan kegiatan penanaman modal.

Evaluasi terhadap Pencapaian Program dan Kegiatan

Secara umum capaian kinerja BKPM periode 2005-2009 dinilai baik yang ditandai dengan terlampauinya target penanaman modal, serta pelaksanaan program dan kegiatan. Beberapa program internal telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja BKPM. Sementara program yang berkait dengan tugas koordinasi dengan lembaga eksternal (K/L, Bank Indonesia/BI dan daerah) dirasakan belum optimal. Kemajuan di bidang hukum dan perundang-undangan belum diimbangi dengan peraturan pelaksanaannya, sehingga implementasi di lapangan masih menemui banyak hambatan. Misalnya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal telah mengatur kedudukan, tugas dan fungsi BKPM sebagai representasi Pemerintah Pusat. Namun implementasi Perpres ini masih terkendala belum adanya regulasi tentang koordinasi dan harmonisasi kebijakan. Sementara itu, Perpres Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di bidang penanaman modal masih menyimpan potensi tarik menarik kepentingan yang harus dijawab oleh BKPM di antaranya dengan menyusun norma dan standar operasi prosedur perizinan di bawah sistem PTSP di bidang penanaman modal beserta sosialisasinya.

a. Evaluasi Aspek Kelembagaan

a.1. Evaluasi Aspek Kelembagaan 2005-2009

Terdapat tiga pokok perhatian yang ingin dikedepankan dalam mengevaluasi perkembangan aspek kelembagaan penanaman modal, yaitu: (i) kedudukan, tugas dan fungsi BKPM (*legal-regulatory aspect*); (ii) pengembangan sumberdaya internal (*capacity development*); dan (iii) capaian Renstra 2005-2009 terkait dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Pertama, kedudukan BKPM yang berada langsung di bawah Presiden, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, merupakan suatu kemajuan besar kebijakan di bidang penanaman modal, dimana tidak ada lagi subordinasi BKPM di bawah kementerian atau lembaga lain. Dengan demikian, BKPM dapat secara efektif menjalankan arahan langsung dari Presiden. Namun di sisi lain, tugas dan fungsi (tusi) BKPM sesuai Perpres Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal masih menyimpan sejumlah agenda permasalahan yang dapat mempersempit ruang bagi BKPM untuk menjalankan tugas koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar instansi dan daerah. Dalam fungsi perumus kebijakan penanaman modal, belum ada ketentuan yang mengharuskan suatu instansi atau daerah wajib mempertimbangkan usulan/kajian BKPM sebagai salah satu pertimbangan dikeluarkannya kebijakan di bidang penanaman modal. Keadaan ini menjadi semacam disinsentif bagi BKPM untuk meningkatkan kualitas kajian dalam rangka pengusulan kebijakan-kebijakan di bidang penanaman modal, dan secara tidak langsung kurang membantu pencapaian efektivitas pelaksanaan tugas koordinasi.

Seiring dengan munculnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo. Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan struktural di bidang pemerintahan yang salah satu dampaknya adalah desentralisasi kewenangan pelayanan di bidang penanaman modal. Lahirnya Perpres Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Tanggal 23 Juni 2009 diharapkan dapat memecahkan persoalan seputar pelayanan penanaman modal, dan secara langsung dapat mendorong tercapainya kualitas koordinasi antar lembaga dan daerahkhususnya mencakuppersetujuan PMA dan PMDN, Izin Usaha Tetap (IUT); Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT); Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IKTA); dan persetujuan terhadap perubahan rencana penanaman modal.

Pengembangan sistem pelayanan yang menjadi kewenangan BKPM, yang didukung oleh perangkat keras, peranti lunak, maupun sumberdaya manusia (SDM); memberikan dampak bahwa proses perizinan di BKPM dapat diselesaikan dalam hitungan hari. Dengan demikian, masih dirasakan perlu untuk menginventarisasi permasalahan terkait dengan pelayanan penanaman modal yang ada di instansi lain dan daerah agar indikator kinerja dapat diukur secara tepat dan proporsional. Inventarisasi ini dinilai sangat penting dan mendasar dalam rangka implementasi sistem PTSP di bidang penanaman modal sebagai salah satu prioritas dalam melaksanakan RPJMN 2010-2014.

Merujuk pada ketentuan *World Bank*, daya saing penanaman modal tercermin dalam sepuluh kriteria kemudahan berusaha “*Doing Business*”, yaitu meliputi: i) *starting a business*, ii) *dealing with licenses*, iii) *employing workers*, iv) *registering property*, v) *getting credit*, vi) *protecting investors*, vii) *paying taxes*, viii) *trading across borders*, ix) *enforcing contracts*, dan x) *closing a business*. Kesepuluh kriteria tersebut mencerminkan pentingnya koordinasi lintas instansi, seperti: otoritas bidang hukum, ketenagakerjaan, perpajakan, bank sentral, dan Pemda.

Kedua, pengembangan sumberdaya internal BKPM diakui masih menyimpan agenda pengembangannya ke depan, utamanya dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Dalam konteks ini terdapat empat pokok perhatian, yaitu: (i) peningkatan kompetensi SDM untuk menunjang kelancaran roda organisasi-BKPM; (ii) pengembangan *knowledge management* untuk mendukung fungsi koordinasi, misalnya pengetahuan tentang pasar keuangan dan kelembagaan global, hubungan dengan daerah dan instansi teknis; (iii) pendayagunaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) sebagai *center of excellence* bidang penanaman modal bagi BKPM maupun instansi lain; dan (iv) pentingnya *talent management* untuk mengantisipasi tantangan ke depan.

BKPM telah menyelenggarakan berbagai paket pendidikan dan pelatihan (Diklat) dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur yang lebih berkualitas, handal, efektif dan efisien. Beberapa diklat dimaksud seperti: Diklat Struktural (kepemimpinan), Diklat Prajabatan, Diklat Teknis, termasuk Diklat Teknis Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal dan Peningkatan Kemampuan dan kualitas Aparatur Daerah di bidang penanaman modal yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Instansi Penanaman Modal Provinsi (IPMP).

Secara umum hasil Diklat menunjukkan perkembangan seperti yang diharapkan, antara lain terlihat dari meningkatnya kualitas pelayanan perizinan penanaman modal yang diselenggarakan BKPM, percepatan waktu registrasi perizinan, peningkatan kompetensi aparatur, serta peningkatan informasi penanaman modal. Namun demikian, berbagai paket diklat ini lebih bersifat generik yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur. Sisi lain yang perlu dikembangkan adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia BKPM agar mampu memahami dan tanggap terhadap perubahan iklim penanaman modal (nasional dan global), sehingga dapat mengantisipasi perubahan yang perlu dilakukan baik dalam segi kebijakan, tata kelola, norma dan standar, teknik dan strategi serta sarana dan prasarana di

tubuh BKPM.

Ketiga, evaluasi terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran strategis erat kaitannya dengan capaian kualitas kelembagaan BKPM dalam melaksanakan Renstra 2005-2009. Visi “menjadi negara tujuan investasi yang menarik” ditetapkan sebagai bagian dari kelanjutan upaya pemulihan pasca krisis 1997/98 dan merupakan implementasi dari sistem perencanaan pembangunan nasional secara teknokratik dan visioner. Stabilitas politik dan keamanan pasca pemilihan umum (Pemilu) 2004 telah meletakkan pondasi yang kokoh bagi pelaksanaan RPJMN 2005-2009 yang menjiwai Renstra 2005-2009.

Karena itu, dapat dipahami bahwa visi tersebut lebih membawa semangat peningkatan, namun belum tampak fokus prioritas pada peningkatan pelayanan, koordinasi dan harmonisasi kebijakan. Setiap instansi K/L berupaya untuk berperan menarik penanam modal sebanyak-banyaknya untuk merealisasikan program-programnya. Demikian halnya dengan daerah dimana semangat otonomi telah membuka lebar kebijakannya untuk memacu kegiatan penanaman modal bagi perekonomian daerah. Sementara dalam lima tahun ke depan, arah peningkatan harus ditempuh melalui kebijakan dan program-program secara sistemik dan sinergis oleh segenap pemangku kepentingan di pusat maupun daerah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Renstra BKPM 2005-2009 menetapkan empat misi, sembilan tujuan dan tujuh belas sasaran. Pada bagian ini, evaluasi tidak ditujukan untuk mengupas secara rinci satu persatu dari setiap pencapaian tujuan dan sasaran, melainkan rangkuman atas telaah dalam lingkup pelaksanaan misi BKPM.

Pelaksanaan Misi-1 “mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang lebih kondusif” telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun terdapat hal-hal fundamental yang harus diperbaiki. Kemajuan di bidang peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan fundamental kegiatan penanaman modal dan kedudukan BKPM. Perlu berbagai peraturan pelaksanaan untuk mendukung tugas koordinasi dan pelayanan yang diemban BKPM. Sementara terkait dengan perencanaan yang menyeluruh, agenda ke depan adalah merampungkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sebagai amanat Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM). Sementara pengembangan informasi potensi sumberdaya dan peluang usaha, kebijakan pemberdayaan usaha, pelayanan informasi dan fasilitasi kemitraan usaha masih menuntut kebijakan lebih lanjut, utamanya yang berkaitan dengan koordinasi dan harmonisasi kebijakan dengan instansi lain dan Pemda.

Secara ringkas, capaian 2005-2009 yang perlu perbaikan dalam 2010-2014 dalam konteks peningkatan iklim penanaman modal yang kondusif menyangkut tiga hal, yaitu:

1. Penerbitan/penyempurnaan produk-produk peraturan sebagai penjabaran UUPM Nomor 25 Tahun 2007, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pelayanan dan koordinasi penanaman modal. Termasuk dalam hal ini adalah langkah-langkah implementasi dan sinkronisasi kebijakan antarinstansi dan daerah.
2. Peningkatan aspek perencanaan penanaman modal secara terpadu (*integrated*) yang ditandai dengan rampungnya penyusunan dan pengesahan RUPM sebagai amanat UUPM Nomor 25 Tahun 2007.
3. Peningkatan sistem informasi potensi secara sektoral dan kewilayahan yang selalu dimutakhirkan. Termasuk di dalamnya peningkatan kapasitas infrastruktur seperti Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) dan informasi berbasis internet melalui www.regionalinvestment.com.

Pelaksanaan Misi-2 "meningkatkan efektivitas promosi dan kerjasama penanaman modal" menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, terlihat dari peningkatan minat dan realisasi penanaman modal. Ke depan perlu dikaji lebih dalam faktor fundamental pemicu keberhasilan ini agar berkelanjutan dalam jangka panjang. Sementara dalam hal kesepakatan kerjasama dengan mengakomodasi kepentingan nasional masih menyisakan tantangan pelaksanaan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang memerlukan kesiapan nasional dan dukungan instansi teknis. Sejalan kondisi makro ekonomi yang stabil selama lima tahun terakhir, terutama sebelum terjadinya krisis keuangan global, promosi dan kerjasama penanaman modal menunjukkan peningkatan. Kondisi demikian membuat pemodal tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga target penanaman modal bisa tercapai.

Pelaksanaan Misi-2 merefleksikan capaian pada Misi-1, bahwa kegiatan promosi dan kerja sama internasional dapat membuahkan hasil bila telah ditempuh upaya-upaya menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif. Karena itu, persoalan mendasar seputar promosi dan kerja sama internasional adalah sejauh mana daya saing telah diwujudkan sebagaimana dicapai dalam pelaksanaan Misi-1. Tanpa itu, kegiatan promosi dan tawaran kerja sama tidak akan berhasil. Meski demikian, perlu dikembangkan model-model promosi yang lebih menarik dan dapat dilakukan secara efisien, seperti menyangkut penyiapan bahan promosi, bahan perundingan bilateral, dan penggunaan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan promosi yang efektif. Agenda

lain yang perlu ditingkatkan adalah pelaksanaan promosi terpadu dengan berbagai instansi dan daerah, serta meningkatkan peran *Indonesian Investment Promotion Center* (IIPC) dalam kegiatan promosi aktif.

Peningkatan aspek pelayanan, fasilitasi dan advokasi pelaksanaan penanaman modal sebagaimana tertuang dalam Misi-3 dapat dicapai, namun masih diperlukan banyak perbaikan. Hal ini utamanya berkait dengan pelayanan yang menjadi kewenangan instansi teknis, sementara koordinasi di bidang pelayanan yang dijalankan BKPM belum sepenuhnya membuahkan hasil optimal. Di tubuh BKPM, kualitas pelayanan telah berhasil ditingkatkan yang ditandai dengan makin singkatnya proses perizinan. Namun, indikator daya saing nasional terbentuk dari seluruh proses pelayanan yang pelaksanaannya menyangkut kewenangan banyak instansi teknis dan Pemda. Karena itu, momentum di penghujung Renstra tahun 2005-2009 dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di bidang penanaman modal diharapkan dapat menjadi instrumen kebijakan yang efektif bagi BKPM untuk meningkatkan perannya dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal nasional. Dalam hal pemantauan dan pengawasan kegiatan penanaman modal, mengingat beban target yang relatif tinggi dibanding kapasitas sistem yang tersedia, maka hasil yang dicapai dinilai belum maksimal.

Pelaksanaan Misi-4 "meningkatkan peran kelembagaan dan sistem informasi penanaman modal" menunjukkan kinerja yang cukup baik. Adanya *standard operating procedure* (SOP) yang didukung perangkat teknologi informasi dan komputerisasi telah meningkatkan kualitas pelayanan administrasi aparatur BKPM kepada masyarakat (calon penanam modal). Namun demikian, kualitas pelayanan informasi dan perencanaan masih memerlukan penyempurnaan. Sedangkan tujuan terwujudnya hubungan masyarakat yang efektif masih memerlukan perbaikan melalui berbagai cara atau media yang efektif guna menumbuhkan pemahaman yang sama akan peran BKPM dan pentingnya sektor penanaman modal bagi perekonomian nasional. Ini ditujukan bukan semata kepada calon penanam modal, melainkan kepada segenap masyarakat termasuk kalangan akademisi, mahasiswa, praktisi bisnis Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Pemda. Secara umum dengan mempertimbangkan ketentuan administrasi negara dan penerapan manajemen lembaga negara, BKPM telah menjalankan keseluruhan *best practice* secara normatif dalam menjalankan misi keempat ini.

a.2. Evaluasi Aspek Kelembagaan 2010

a.2.1. Peran Baru BKPM dalam Fasilitasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Dengan telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Koordinasi Fasilitasi dan Pemberian Dukungan Pelaksanaan Percepatan Realisasi Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (KPS di Bidang Infrastruktur), ditetapkan peran baru BKPM untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan pelaksanaan percepatan realisasi proyek-proyek KPS di Bidang Infrastruktur. Kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan keanggotaan BKPM dalam Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang KKPPI.

Ruang lingkup tugas baru BKPM tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengemas informasi tentang proyek infrastruktur yang siap ditawarkan sehingga menarik bagi investor;
2. Mencari dan mengidentifikasi investor yang potensial dan menawarkan proyek infrastruktur kepada investor;
3. Memfasilitasi pemasaran proyek infrastruktur yang siap ditawarkan;
4. Memfasilitasi kerjasama dengan para calon investor dan dukungan Pemerintah;
5. Menyampaikan daftar para calon investor dan dokumen penunjang kepada penanggung jawab proyek kerjasama di kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah (*contracting agency*) untuk diproses lebih lanjut;
6. Memfasilitasi penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek KPS termasuk pembentukan Badan Usaha pelaksana proyek KPS melalui PTSP di bidang Penanaman Modal;
7. Melakukan monitoring atas pelaksanaan rencana aksi dan pemenuhan target dari tiap pemangku kepentingan;
8. Melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan yang ditemui (*clearing house agent*).

Terkait dengan tugas baru tersebut, BKPM telah mengubah Peraturan Kepala (Perka) BKPM No 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPM menjadi Perka BKPM No 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Perka BKPM No 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPM.

Melalui Perka baru tersebut BKPM memiliki tambahan tugas baru yaitu melakukan pengkajian dan penyusunan rencana umum dan rencana strategis, penyiapan informasi, pengemasan pemasaran, fasilitasi perizinan dan non-perizinan, dan fasilitasi kerjasama antar lembaga untuk pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) dan non-skema kerjasama pemerintah dan swasta, dengan cakupan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan usulan master plan proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS;
2. Penyusunan sistem informasi peta penanaman modal infrastruktur dan proyek-proyek strategis yang terintegrasi di seluruh Indonesia;
3. Fasilitasi proyek-proyek di bidang infrastruktur yang menjadi Prioritas Nasional melalui skema KPS;
4. Perencanaan potensi penanaman modal proyek-proyek infrastruktur Prioritas Nasional yang siap ditawarkan kepada calon investor;
5. Kajian keterkaitan infrastruktur dengan peningkatan daya saing Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan 6 (enam) Koridor Ekonomi Indonesia;
6. Penyusunan market intelligence pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur;
7. Pemetaan potensi penanaman modal infrastruktur di bidang transportasi (darat, jalan dan jembatan), energi & sumber daya air, serta infrastruktur transportasi laut, udara dan infrastruktur lainnya

a.2.2. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal

Dalam rangka mendukung peningkatan realisasi dan persebaran penanaman modal dan fasilitasi percepatan pembangunan infrastruktur, maka BKPM perlu melakukan:

1. penguatan kelembagaan melalui program Revitalisasi Strategi Promosi Penanaman Modal Indonesia, Kegiatan *Rebranding* Penanaman modal Indonesia melalui Media Internasional, peningkatan penggunaan teknologi

komunikasi dan informasi, peningkatan jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang dapat melayani penanaman modal melalui PTSP di bidang penanaman modal dan SPIPISE, perbaikan sistem dan prosedur penanaman modal, pengembangan pengemasan informasi peluang penanaman modal baik sektoral maupun infrastruktur dengan skema KPS dan non-KPS, serta peningkatan sarana dan prasarana kantor.

2. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang penanaman modal, pemberian beasiswa pasca sarjana, peningkatan kemampuan berbahasa asing, peningkatan keikutsertaan pada berbagai workshop dan seminar penanaman modal baik di dalam maupun di luar negeri.

b. Evaluasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Seperti telah diuraikan dalam evaluasi kelembagaan, evaluasi program dan kegiatan pada dasarnya berkait dengan berbagai masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan misi BKPM. Karena itu, evaluasi dalam bagian ini tidak ditujukan untuk mengurai secara rinci setiap pokok kegiatan dalam setiap program, yang dalam banyak hal telah dimuat di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP). Program dan kegiatan berada dalam lingkup teknis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi eselon-1 dan eselon-2.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan selama 2005-2009 telah berjalan dengan baik dan telah memberikan *impact* yang signifikan terhadap kinerja BKPM. Namun demikian, dalam kerangka pertimbangan Renstra 2010-2014 bagi perbaikan kinerja penanaman modal ke depan, evaluasi terhadap program dan kegiatan dalam Renstra 2005-2009 memiliki catatan penting seperti dikemukakan berikut ini:

1. Dalam hal tugas penyusunan kajian dan usulan kebijakan, diperlukan suatu kerangka kerja yang lebih mengikat dimana hasil kajian BKPM mendapat pertimbangan penting atau sebagai salah satu syarat dalam proses pembahasan dan pengesahannya, baik dalam proses legislasi maupun proses regulasi di tubuh instansi teknis dan Pemda. Misalnya, berkait dengan kebijakan insentif penanaman modal. Hasil kajian BKPM terkait insentif mesti menjadi salah satu pertimbangan penting bagi otoritas teknis (misal, Kementerian Keuangan/Kemenkeu terkait insentif fiskal) untuk mengeluarkan regulasi di bidang insentif penanaman modal.

2. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang dilakukan BKPM sebaiknya dilandasi ketentuan hukum agar instansi teknis dan daerah secara proaktif lebih membuka diri untuk berkoordinasi. Misalnya, dalam hal penetapan target dan sebaran penanaman modal secara sektoral dan kewilayahan jelas membutuhkan sikap terbuka/konsolidatif dari seluruh instansi teknis dan daerah. Prioritas pembangunan infrastruktur, energi, dan implementasi sistem PTSP di bidang penanaman modal merupakan agenda utama yang memerlukan koordinasi intensif seluruh pemangku kepentingan.
3. Peningkatan sistem informasi dan pengelolaannya masih memerlukan komunikasi intensif yang diarahkan bukan saja untuk membangun peta potensi secara komprehensif, namun juga selalu dimutakhirkan baik dalam hal data/informasi maupun kemungkinan adanya perubahan regulasi di pusat maupun daerah.
4. Untuk proyek-proyek tertentu seperti pembangunan infrastruktur dan energi, pola kemitraan public private partnership dipandang sangat cocok dijalankan. Namun, kemitraan ini seringkali dilakukan tanpa terkonsolidasi dalam kebijakan di bawah koordinasi BKPM, melainkan berjalan atas kebijakan instansi/daerah sendiri-sendiri. Peran BKPM hendaknya dapat meningkat untuk mengundang penanam modal, namun juga harus dibarengi dengan kebijakan yang padu dengan instansi teknis.
5. Peningkatan kegiatan promosi yang padu dan lebih terarah, dan dengan mengupayakan peningkatan peran IIPC atau perwakilan penanaman modal di luar negeri. Kegiatan promosi merupakan tindak lanjut dari upaya peningkatan iklim penanaman modal yang lebih kondusif, termasuk peningkatan pelayanan. Karena itu, koordinasi dan konsolidasi internal BKPM harus berjalan optimal, disamping koordinasi dan harmonisasi dengan instansi teknis dan daerah.
6. Implementasi sistem PTSP di bidang penanaman modal di pusat dan di daerah dan dengan diimbangi peningkatan sistem pelayanan di kantor BKPM. Poin ini mendapat prioritas tinggi untuk mengangkat daya saing penanaman modal dan dapat memecah persoalan mendasar seputar koordinasi pelayanan penanaman modal antarinstansi dan dengan daerah.
7. Aspek pengendalian dan pembinaan penanaman modal mesti terus ditingkatkan untuk menjaga kelangsungan kegiatan penanaman modal, mencegah terjadinya pelarian modal, memantau kegiatan penanam modal domestik yang menjalankan kegiatan usahanya di luar negeri, dan advokasi

terhadap masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan penanaman modal, utamanya di daerah. Kegiatan pengendalian dan pembinaan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya meningkatkan daya saing penanaman modal.

8. Peningkatan dukungan manajemen, sarana dan prasarana kelembagaan diarahkan untuk meningkatkan kinerja lembaga dan kualitas SDM yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.

c. Evaluasi Capaian Target Penanaman Modal 2005-2009

c.1. Persetujuan dan Realisasi Penanaman Modal

Iklim penanaman modal dalam periode 2005-2009 menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan, ditandai dengan meningkatnya persetujuan maupun realisasi PMA dan PMDN. Jumlah proyek persetujuan PMA naik rata-rata sebesar 11,8 persen per tahun yang diikuti dengan meningkatnya nilai minat penanaman modal rata-rata sebesar 31,3 persen per tahun (US\$ 10,5 miliar pada tahun 2004 menjadi US\$ 23,4 miliar pada tahun 2009). Jumlah proyek persetujuan PMDN naik rata-rata sebesar 6,5 persen per tahun yang diikuti dengan meningkatnya nilai minat penanaman modal sebesar 51,7 persen per tahun (Rp 44,8 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 195,5 triliun pada tahun 2009).

Realisasi penanaman modal periode yang sama juga menunjukkan tren meningkat. Jumlah proyek PMA yang direalisasikan naik rata-rata sebesar 19,5 persen per tahun dimana nilai penanaman modalnya meningkat rata-rata sebesar 30,3 persen per tahun (US\$ 4,6 miliar pada tahun 2004 menjadi US\$ 10,8 miliar pada tahun 2009). Jumlah realisasi proyek PMDN naik rata-rata sebesar 18,6 persen per tahun dengan peningkatan nilai penanaman modal sebesar 35,9 persen per tahun (Rp 15,4 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 37,8 triliun pada tahun 2009).

Jika dibandingkan dengan periode 5 (lima) tahun sebelumnya (tahun 2000-2004), realisasi PMA secara kumulatif baik jumlah proyek maupun nilainya selama periode 2005-2009 naik masing-masing sebesar 93,53 persen dan 83,27 persen. Demikian pula jumlah proyek dan nilai realisasi PMDN meningkat masing-masing 24,91 persen dan 104,03 persen.

Dilihat dari sisi sektoral, peningkatan nilai realisasi PMA dan PMDN tertinggi terjadi pada sektor primer yaitu 154,33 persen dan 229,11 persen.

Tabel 1.1.
Perkembangan Realisasi PMA dan PMDN Sektoral

Sektor	2005-2009		2000-2004		Growth (%)	
	Proyek	Nilai	Proyek	Nilai	Proyek	Nilai
PMA (US\$ juta)						
Sektor Primer	250	2.337,8	110	919,2	127,27	154,33
Sektor Sekunder	2.056	20.158,5	1.372	13.198,4	49,85	52,73
Sektor Tersier	2.811	28.435,1	1.162	13.673,5	141,91	107,96
Total	5.117	50.931,4	2.644	27.791,1	93,53	83,27
PMDN (Rp miliar)						
Sektor Primer	134	19.727,9	74	5.994,3	81,08	229,11
Sektor Sekunder	693	95.643,0	586	49.676,4	18,26	92,53
Sektor Tersier	196	29.044,2	159	15.110,4	23,27	92,21
Total	1.023	144.415,1	819	70.781,1	24,91	104,03

Sumber: Pusdatin BKPM

c.2. Sebaran Penanaman Modal secara Regional

Secara regional, kinerja penanaman modal dalam periode 2005-2009 PMA dan PMDN masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nilai realisasi penanaman modal di Pulau Jawa baik PMA dan PMDN masing-masing sebesar 83,0 persen dan 49,1 persen dari total realisasi. Untuk itu, diperlukan upaya pemerataan antara lain melalui pemberian fasilitas insentif penanaman modal yang lebih menarik, peningkatan kepastian hukum, penyediaan infrastruktur dan pasokan energi yang memadai di luar Pulau Jawa. Koordinasi antar instansi pemerintah, serta antara pemerintah pusat dan daerah perlu ditingkatkan dalam rangka menciptakan iklim penanaman modal yang lebih kondusif di luar Pulau Jawa. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah dan antardaerah merupakan agenda penting dan mendesak untuk meningkatkan pemerataan penanaman modal.

Tabel 1.2.
Perkembangan Nilai Realisasi Penanaman Modal secara Regional

Keterangan	2005	2006	2007	2008	2009
PMA (US\$. Juta)					
Jawa	7.239,8	4.416,4	8.503,5	13.566,8	9.370,6
Luar Jawa	1.671,2	1.575,3	1.837,9	1.304,6	1.444,6
Total	8.911,0	5.991,7	10.341,4	14.871,4	10.815,2
% Jawa	81,2	73,7	82,2	91,2	86,6
PMDN (Rp Milyar)					
Jawa	14.856,0	13.030,8	18.668,9	12.230,7	7.819,6
Luar Jawa	15.868,3	7.618,2	16.209,9	8.132,7	29.980,2
Total	30.724,3	20.649,0	34.878,7	20.363,4	37.799,8
% Jawa	48,4	63,1	53,5	60,1	20,7

Sumber: Pusdatin BKPM

c.3. Sebaran Penanaman Modal secara Sektoral

Dari sisi sektoral, kegiatan PMA dalam periode 2005-2009 masih terkonsentrasi pada sektor sekunder dan tersier (mencakup lebih dari 90 persen dari total nilai realisasi PMA). Sementara itu, sektor primer (industri hulu) hanya mencakup sekitar 5,1 persen dari total nilai realisasi PMA. Sedangkan untuk PMDN, realisasi kegiatan penanaman modal terkonsentrasi pada sektor sekunder (mencakup lebih dari 60 persen dari total nilai realisasi PMDN). Adapun, sektor primer (industri hulu) dan tersier berturut-turut rata-rata sebesar 13,7 persen dan 19,1 persen dari total PMDN.

Rendahnya kegiatan penanaman modal pada sektor primer karena penanam modal selalu menghendaki keuntungan maksimal dengan risiko yang rendah. Keuntungan maksimal umumnya diperoleh pada sektor sekunder dan tersier dimana terjadi proses penciptaan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi dibanding sektor primer.

Tabel 1.3.
Komposisi Nilai Realisasi Penanaman Modal secara Sektoral

Keterangan	2005	2006	2007	2008	2009
PMA (US\$. Juta)					
SEKTOR PRIMER	402,3	532,4	599,3	335,6	462,6
(%)	4,5	8,9	5,8	2,3	4,3
SEKTOR SEKUNDER	3.500,6	3.619,7	4.697,0	4.515,2	3.831,1
(%)	39,3	60,4	45,4	30,4	35,4
SEKTOR TERSIER	5.008,1	1.839,5	5.045,1	10.020,5	6.521,4
(%)	56,2	30,7	48,8	67,4	60,3
Total PMA	8.911,0	5.991,7	10.341,4	14.871,4	10.815,2
PMDN (Rp Milyar)					
SEKTOR PRIMER	5.577,2	3.599,8	4.377,3	1.757,7	4.415,9
(%)	18,2	17,4	12,6	8,6	11,7
SEKTOR SEKUNDER	20.991,3	13.012,7	26.289,8	15.914,8	19.434,4
(%)	68,3	63,0	75,4	78,2	51,4
SEKTOR TERSIER	4.155,8	4.036,5	4.211,6	2.690,8	13.949,5
(%)	13,5	19,5	12,1	13,2	36,9
Total PMDN	30.724,3	20.649,0	34.878,7	20.363,4	37.799,8

Sumber: Pusdatin BKPM

Untuk mengatasi ketimpangan sektoral ini, akan dikembangkan struktur industri yang terpadu (*integrated industry*) seperti program HTI yang pernah dikembangkan untuk menciptakan industri hasil hutan terpadu (*integrated wood based industry*) pada tahun 1980-an. Beberapa jenis industri yang dapat dikembangkan untuk tujuan ini di antaranya adalah industri *Crude Palm Oil/CPO* (dari pengelolaan kebun sampai pengolahan produk-produk turunan CPO), industri pangan (budidaya sampai pengolahan) dan perikanan (perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan). Diperlukan iklim dan skim insentif yang

tepat untuk mendorong terciptanya pemerataan sektoral, sebagaimana halnya untuk pemerataan secara kewilayahan.

c.4. Penyerapan Tenaga Kerja dari Kegiatan Penanaman Modal

Penyerapan tenaga kerja pada proyek PMA bergerak fluktuatif. Pada 2005, penyerapan tenaga kerja PMA mencapai 156 ribu tenaga kerja, naik menjadi 207.189 tenaga kerja pada 2009. Pada 2009, sebesar 16,1 persen tenaga kerja terserap berada di Sumatera; 76,9 persen di Jawa; 2,6 persen di Kalimantan, 2,1 persen di Sulawesi; 0,2 persen di Maluku dan 0,1 persen di Papua dan Papua Barat.

Penyerapan tenaga kerja PMDN selama 2005-2009 cukup membaik. Pada 2009, penyerapan tenaga kerja di Sumatera naik 15,4 persen (yoy) menjadi 13 ribu tenaga kerja. Kondisi yang sama juga terjadi pada penyerapan tenaga kerja di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara serta Kalimantan, masing-masing naik 58,3 persen (yoy); 163,7 persen (yoy) dan 47,8 persen (yoy); sedangkan lokasi lainnya cenderung menurun.

Secara keseluruhan, penyerapan tenaga kerja PMA pada sektor primer mencapai 95 ribu tenaga kerja selama 2005-2009; sedangkan pada sektor sekunder dan tersier masing-masing 744 ribu dan 159 ribu. Penyebaran tenaga kerja PMA pada sektor primer selama 2005-2009 mencapai 12,2 persen per tahun; sektor sekunder 95,4 persen dan sektor tersier 20,5 persen.

Penyerapan tenaga kerja sektor primer pada PMDN mencapai 142 ribu tenaga kerja selama 2005-2009 atau 31,3 persen dari total penyerapan tenaga kerja. Sementara pada sektor sekunder mencapai 278 ribu atau 61,3 persen dari total penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja pada sektor tersier pada 2005-2009 mencapai 33 ribu atau 7,4 persen dari total penyerapan tenaga kerja.

d. Evaluasi Capaian Target Penanaman Modal 2010

Pada tahun 2010, terkait dengan iklim penanaman modal dan iklim usaha, *Global Competitiveness Report 2010-2011* yang diterbitkan *World Economic Forum* (WEF) menempatkan Indonesia pada peringkat 44 dari 133 negara yang disurvei. Angka ini meningkat dibanding tahun 2009-2010 yang berada pada peringkat 54 dari 133 negara. Sementara peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business*) yang diterbitkan oleh *World Bank* (2010) menempatkan Indonesia pada peringkat 121 dari 183 negara yang disurvei. Posisi Indonesia ini jika dibandingkan dengan negara BRIC (Brazil, Rusia,

India, dan China) masih berada di atas Brazil, Rusia dan India. Laporan *International Institute for Management Development (IMD)* dalam *World Competitiveness Yearbook 2010* menyatakan daya saing Indonesia menempati peringkat 35 dari 58 negara, meningkat dibanding 2009 yang peringkat 42 dari 57 negara.

Meskipun peringkat Indonesia sebagaimana disebut diatas telah naik dan membaik, hal ini tidak dapat ditafsirkan bahwa kegiatan di bidang penanaman modal dapat berjalan sebagaimana diharapkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Masih terdapat dua isu pokok yang dihadapi BKPM terkait kondisi umum penanaman modal di Indonesia di tahun 2010 yaitu: pertama, peningkatan realisasi yang disertai dengan penyesuaian target realisasi penanaman modal. Kedua, persebaran penanaman modal yang lebih merata di seluruh Indonesia. Kedua hal tersebut harus didukung dengan kesediaan infrastruktur. Untuk itu pemerintah memutuskan peran baru BKPM dalam percepatan pembangunan infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

d.1. Evaluasi Realisasi dan Penyesuaian Target Realisasi Penanaman Modal

Target realisasi penanaman modal untuk tahun 2010, yakni sebesar Rp 160,1 triliun telah terlampaui realisasinya, yakni sebesar Rp 208,5 triliun, atau melampaui target sekitar 30,2% (Rp48,4 Triliun). Di samping telah terlampauinya target tahun 2010, beberapa kondisi di bawah ini turut mendorong penyesuaian target realisasi penanaman modal pada tahun 2011-2014, di antaranya:

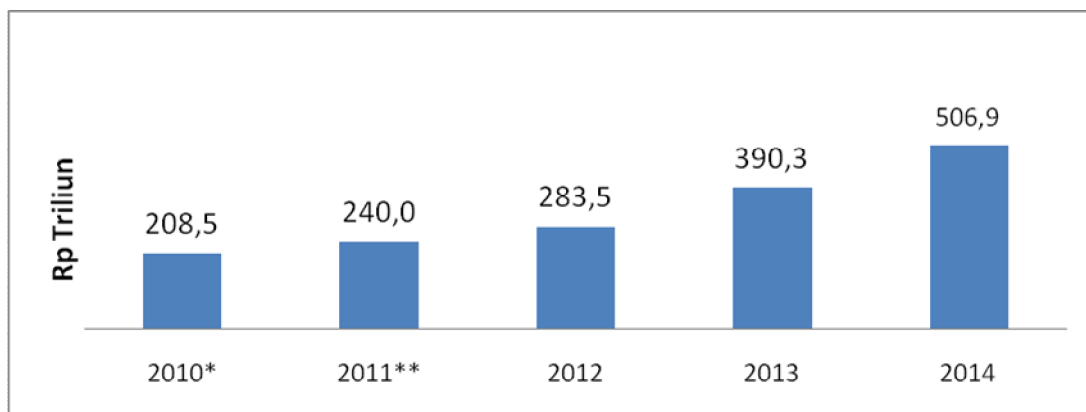
1. Inflasi tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 diperkirakan lebih tinggi dari proyeksi Bappenas dalam RPJMN. Hal ini akan mengakibatkan deflator PMTB lebih tinggi di tahun-tahun mendatang yang mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan proyeksi PMTB menjadi lebih tinggi. Dengan perhitungan inflasi di atas, maka rasio realisasi PMA dan PMDN terhadap PMTB nominal tahun 2014 diperkirakan 13 persen.
2. Bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini di berbagai negara seperti gempa bumi, tsunami, dan kerusakan reaktor nuklir di Jepang, banjir di Australia dan Amerika diperkirakan mulai tahun 2013 akan berpengaruh terhadap realisasi penanaman modal.
3. Masa Pemilihan Umum di tahun 2014, diperkirakan dapat berpengaruh kepada keputusan investor untuk merealisasikan kegiatan penanaman

modal hingga terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden baru, sehingga dapat mempengaruhi pencapaian realisasi penanaman modal di tahun 2013 dan 2014.

4. Posisi *rating* Indonesia yang terus mendekati *investment grade* di berbagai lembaga pemeringkat utang, yang akan membuat Indonesia semakin menarik di mata calon investor.

Dengan memperhatikan beberapa kondisi dan isu-isu strategis di atas, diperlukan penyesuaian target realisasi penanaman modal yang semula sebesar Rp 1.544,4 triliun menjadi sebesar Rp 1.629,2 triliun dalam periode 2010-2014 atau meningkat 5,5%, dengan rincian sebagaimana dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Nilai Realisasi Penanaman Modal Periode 2010-2014



*realisasi tahun 2010

** Proyeksi Baru Nilai Realisasi Penanaman Modal tahun 2011-2014

d.2. Sebaran Penanaman Modal secara Regional

Selama periode 2005-2009, persebaran penanaman modal masih terkonsentrasi di 6 (enam) provinsi di Pulau Jawa, dengan jumlah realisasi penanaman modal di keenam provinsi tersebut rata-rata mencapai 77% dari nilai realisasi penanaman modal nasional. Adapun perkembangan realisasi penanaman modal selama periode 2005-2010 dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4.
Penyebaran Realisasi Penanaman Modal di Tiap Provinsi 2005-2010

PROVINSI	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005-2010	PENYEBARAN 2010	PENYEBARAN 2005-2010
D.I ACEH	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1	0,4	0,0%	0,1%
SUMATERA UTARA	1,2	1,1	3,2	1,5	3,3	2,3	12,7	1,1%	1,6%
SUMATERA BARAT	0,4	0,1	0,5	0,3	0,5	0,1	1,9	0,1%	0,2%
RIAU	17,4	7,8	9,6	6,1	5,7	1,8	48,4	0,9%	6,0%
JAMBI	0,3	0,9	4,9	1,6	0,6	0,6	8,9	0,3%	1,1%
SUMATERA SELATAN	1,8	0,9	2,7	1,4	1,1	3,4	11,4	1,6%	1,4%
BENGGULU	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,5	0,1%	0,1%
LAMPUNG	1,7	1,7	1,3	1,3	0,8	0,6	7,4	0,3%	0,9%
BANGKA BELITUNG	1,0	0,0	0,3	0,0	0,5	0,2	2,0	0,1%	0,2%
KEPULAUAN RIAU	0,6	0,1	0,6	1,5	2,3	1,7	6,8	0,8%	0,8%
SUMATERA	24,6	12,6	23,3	13,9	14,8	11,0	100,3	5,3%	12,4%
DKI JAKARTA	32,0	16,3	46,3	91,2	59,3	63,2	308,4	30,3%	38,0%
JAWA BARAT	26,5	19,9	23,3	27,3	22,1	31,2	150,3	15,0%	18,5%
JAWA TENGAH	1,2	3,7	1,2	2,6	3,4	1,3	13,4	0,6%	1,6%
DI YOGYAKARTA	0,2	0,5	0,0	0,1	0,1	0,1	1,0	0,0%	0,1%
JAWA TIMUR	10,4	4,0	16,9	6,9	8,1	24,2	70,5	11,6%	8,7%
BANTEN	9,8	8,4	7,4	6,3	17,1	19,9	69,0	9,6%	8,5%
JAWA	80,1	52,8	95,2	134,3	110,1	140,0	612,5	67,1%	75,5%
BALI	0,9	0,9	0,5	0,8	2,1	2,9	8,0	1,4%	1,0%

PROVINSI	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005-2010	PENYEBARAN 2010	PENYEBARAN 2005-2010
NUSA TENGGARA BARAT	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	3,8	4,2	1,8%	0,5%
NUSA TENGGARA TIMUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0%	0,0%
BALI & NUSA TENGGARA	1,0	1,1	0,5	0,9	2,2	6,7	12,3	3,2%	1,5%
KALIMANTAN BARAT	0,6	0,1	0,4	0,6	0,8	2,7	5,2	1,3%	0,6%
KALIMANTAN TENGAH	1,6	1,4	1,1	1,2	1,5	8,5	15,4	4,1%	1,9%
KALIMANTAN SELATAN	0,9	2,0	0,9	0,6	2,4	3,9	10,6	1,9%	1,3%
KALIMANTAN TIMUR	0,4	3,9	1,8	0,4	0,8	17,8	25,1	8,6%	3,1%
KALIMANTAN	3,4	7,3	4,3	2,9	5,5	32,9	56,3	15,8%	6,9%
SULAWESI UTARA	0,2	0,0	0,7	0,4	0,6	2,2	4,0	1,0%	0,5%
SULAWESI TENGAH	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	1,4	2,0	0,7%	0,2%
SULAWESI SELATAN	1,1	0,2	0,6	1,4	1,8	7,2	12,3	3,5%	1,5%
SULAWESI TENGGARA	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,1	3,0	0,1%	0,4%
GORONTALO	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0%	0,1%
SULAWESI BARAT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,6%	0,1%
SULAWESI	1,8	0,2	4,6	1,7	2,5	12,2	23,0	5,8%	2,8%
MALUKU	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0%	0,0%
MALUKU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,2	2,3	1,1%	0,3%

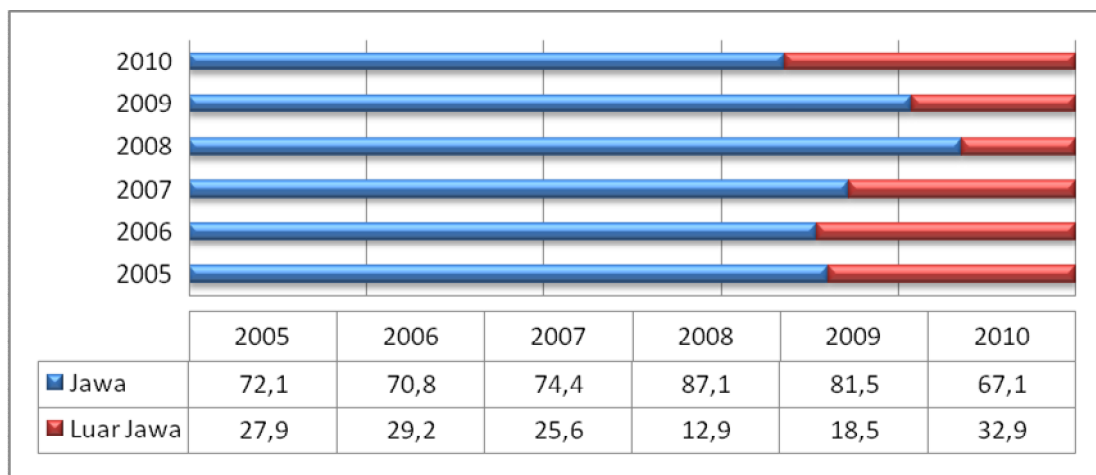
PROVINSI	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005-2010	PENYEBARAN 2010	PENYEBARAN 2005-2010
UTARA									
MALUKU	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	2,3	2,6	1,1%	0,3%
PAPUA	0,0	0,4	0,0	0,5	0,1	0,3	1,3	0,2%	0,2%
IRIAN JAYA BARAT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	1,5%	0,4%
PAPUA	0,0	0,4	0,0	0,5	0,1	3,4	4,4	1,6%	0,5%
NASIONAL	111,0	74,6	127,9	154,2	135,1	208,5	811,4	100,0%	100,0%

Sumber: Pusdatin BKPM

Pada tahun 2010, persentase penanaman modal di luar Pulau Jawa meningkat signifikan sebesar 14,4%, yaitu dari 18,5% di tahun 2009 menjadi 32,9% di tahun 2010. Peningkatan ini karena adanya penyikapan Pemerintah untuk mendorong penanaman modal keluar Pulau Jawa melalui dikeluarkannya kebijakan pengembangan wilayah, peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan meningkatnya kegiatan Pemerintah Daerah untuk mempromosikan potensi penanaman modal di daerah masing-masing.

Persebaran penanaman modal di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa periode 2005-2010 dapat dilihat sebagaimana pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2.
Persebaran PMA dan PMDN 2005 – 2010 (%)



Sumber: Pusdatin BKPM

BKPM menargetkan peningkatan persentase persebaran realisasi penanaman modal di berbagai provinsi di luar Pulau Jawa hingga mencapai 40% pada tahun 2014. Terkait dengan hal ini, BKPM akan memfasilitasi:

1. peningkatan kebijakan pengembangan penanaman modal berbasis kewilayahan dan potensi daerah, antara lain dengan mendorong pemberian insentif daerah di masing-masing daerah dan memperluas pemberian fasilitas penanaman modal di daerah-daerah tertentu.
2. fasilitasi peningkatan pelayanan penanaman modal oleh Pemerintah Daerah, antara lain melalui percepatan implementasi PTSP di bidang penanaman modal dan SPIPISE di seluruh PDPPM dan PDKPM serta penetapan kualifikasi PTSP di bidang penanaman modal. Penetapan kualifikasi penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal terbaik adalah untuk menciptakan “diskriminasi/kompetisi positif di antara daerah provinsi maupun kabupaten/kota” agar daerah yang belum terpilih dapat termotivasi untuk segera melaksanakan penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal dengan lebih baik. Penetapan kualifikasi PTSP di bidang penanaman modal juga diharapkan akan memberikan dorongan kepada daerah untuk meningkatkan kinerja layanan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta penciptaan inovasi-inovasi dalam mekanisme pelayanan perizinan.
3. fasilitasi promosi potensi daerah, antara lain peningkatan promosi penanaman modal yang lebih intensif, terintegrasi, terpadu dan terfokus, di dalam dan luar negeri, antara lain promosi penanaman modal “*Invest in Remarkable Indonesia*” dengan melibatkan sektor-sektor unggulan daerah, prioritas nasional, usaha kecil dan menengah, dunia usaha nasional; melakukan penyebarluasan potensi penanaman modal daerah-daerah melalui kegiatan *National Branding* di media cetak dan elektronik yang berskala internasional; penetapan *Regional Champion* yang baru sebagai daerah/provinsi yang siap untuk menerima penanaman modal asing.
4. fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur penanaman modal di daerah antara lain pendidikan dan pelatihan PTSP di bidang penanaman modal.

1.1.2. Aspirasi Masyarakat di Bidang Penanaman Modal

Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan secara acak melalui opini di media massa dan melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Beberapa opini dan aspirasi masyarakat tersebut antara lain menyatakan bahwa kinerja BKPM secara kuantitas sudah bagus, namun kualitasnya masih lemah. Sebab, yang masuk ke Indonesia adalah penanaman modal yang padat modal, bukan padat tenaga kerja. Ini menyebabkan penyerapan tenaga kerja tidak maksimal. Padahal yang diharapkan setiap pertumbuhan ekonomi satu persen dapat menyerap sebesar 400 ribu tenaga kerja.

Berkait dengan otoritas, kewenangan BKPM perlu diperkuat demi menarik PMA maupun PMDN, sehingga perlu penataan kembali struktur di lembaga ini. BKPM harus diberikan kewenangan lebih dari sekadar koordinator penanaman modal. Ini menjadi salah satu upaya untuk menciptakan aturan-aturan propenanaman modal. BKPM hendaknya memiliki otoritas dalam menetapkan insentif penanaman modal. Selama ini sebagian kalangan memandang BKPM hanya seperti tenaga pemasaran. Padahal, seharusnya mempunyai wewenang melakukan koordinasi, khususnya dengan menteri-menteri terkait di bidang ekonomi serta politik, hukum dan keamanan. Di banyak negara, lembaga pengembangan penanaman modal mempunyai kewenangan besar. Lebih lanjut, untuk promosi penanaman modal di mancanegara, bisa juga membentuk perwakilan di luar negeri, sehingga langkah dan strategi untuk mendorong masuknya penanaman modal lebih jelas dan terarah. Penanaman modal tentunya bukan hanya dari PMA, tetapi juga dari dalam negeri, misalnya pengembangan UMKM.

Dalam FGD mengemuka akan pentingnya penanaman modal yang diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penanaman modal hendaknya tidak menjadi ancaman ketika dominasi asing dalam perekonomian sudah terlalu besar, sehingga akan menggeser kekuatan pelaku ekonomi domestik. Untuk itulah dukungan regulasi begitu krusial. Masyarakat jangan dibiarkan hanya menjadi penonton atas perkembangan kegiatan penanaman modal yang ada di wilayahnya. Disadari pula bahwa penanaman modal membutuhkan infrastruktur dan daya dukung Sumber Daya Alam (SDA) maupun SDM yang memadai; bila salah satu tidak tersedia, maka potensi yang ada di daerah akan sulit berkembang. Terkait dengan infrastruktur, permasalahan penanaman modal sangat bersinggungan dengan Rencana Tata Ruang (RTR), baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), maupun RTR lain yang menjadi penjabaran dari RTRWN. Lemahnya implementasi RTR di Indonesia membuat daya saing penanaman modal menjadi rendah.

Prioritas penanaman modal seperti yang ditegaskan dalam RUPM yaitu pangan, energi, dan infrastruktur perlu terus dikembangkan dengan mengarah pada peningkatan nilai tambah produk. Misalnya saja dalam hal pangan, sektor agribisnis sangat penting untuk dikembangkan ke depan. Alasannya sederhana, negara agraris di dunia ini sangat terbatas sehingga potensi agribisnis akan sangat prospektif. Untuk itu harus ada kebijakan lahan pertanian abadi. RTR harus diimplementasikan dengan baik agar lahan pertanian terselamatkan dari modernisasi pembangunan. Disadari pula bahwa Renstra dapat mendorong sektor-sektor penanaman modal yang mampu mempercepat terjadinya pemerataan penanaman modal. Dengan fokus pada sektor yang mendorong pemerataan, maka pertumbuhan penanaman modal akan cepat dicapai.

Di tingkat daerah masih banyak ditemui fakta adanya kesulitan dalam memulai usaha. Banyak “biaya siluman” yang harus dikeluarkan untuk berbisnis, baik di lingkungan birokrasi pemerintah maupun nonpemerintah. Penanam modal *dijejali* berbagai peraturan yang perubahannya begitu cepat. Peraturan Daerah (Perda) berubah seiring dengan pergantian kepada daerah. Hambatan penanaman modal semakin menjadi-jadi. Permasalahan di daerah semakin rumit ketika diimplementasikannya otonomi daerah. Daerah berlomba-lomba memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara langsung maupun tidak langsung menciptakan ekonomi biaya tinggi.

Permasalahan sektoral penanaman modal selama ini juga terkait dengan minimnya penguasaan teknologi. Teknologi pada sejumlah industri masih tradisional. Penguasaan teknologi di Indonesia masih rendah, dari mulai tahapan produksi hingga pemasaran produk. Ini menyebabkan nilai tambah produk relatif kecil. Sebenarnya, Indonesia dapat mengadopsi penerapan teknologi dari kegiatan PMA. Namun, Indonesia cenderung lambat dalam memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Di sisi lain, pemetaan potensi asli daerah semakin mendesak dilakukan, terutama menyangkut bagaimana pemanfaatannya secara maksimal.

Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menetapkan bahwa K/L hanya memiliki satu program disambut baik oleh daerah. Ini penting untuk memfokuskan kebijakan dan sasaran. Sementara menyangkut kegiatan penanaman modal di daerah, terdapat dua masalah utama, yaitu bagaimana menumbuhkan penanaman modal baru dan bagaimana memantapkan kegiatan penanaman modal yang sudah ada dalam jangka panjang. Dalam kaitannya dengan ketimpangan sektoral dan regional, inisiasi pemerintah dalam membentuk KEK menjadi salah satu upaya mengurangi ketimpangan penanaman modal regional. Pemerintah harus mulai memikirkan

pembukaan KEK di luar Jawa untuk mengurangi konsentrasi penduduk Jawa, sekaligus untuk membuka peluang penanaman modal. Selain itu, perlunya meningkatkan PTSP di bidang penanaman modal sebagai upaya untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan penanaman modal.

Renstra selanjutnya memberikan ruang akomodasi berbagai masalah yang dihadapi baik dalam level pusat maupun daerah. Permasalahan di daerah begitu kompleks, utamanya yang terkait dengan kewenangan. Inilah yang harus dijawab oleh BKPM. Selain itu, perlu kejelasan bagaimana pembagian kewenangan pusat dan daerah terkait dengan penanaman modal dan faktor pendukungnya. Laporan penanam modal menunjukkan bahwa banyak pajak baru di daerah yang muncul. Padahal aturan pemungutan pajak telah diatur ketat. Selain itu, masalah ketersediaan dan kualitas data penanaman modal seringkali menjadi problema bagi pemerintah baik di pusat maupun daerah.

1. 2. Potensi dan Permasalahan

Ulasan yang telah disampaikan dalam bagian “kondisi umum” telah cukup memberikan gambaran akan peta permasalahan dan potensi pengembangan penanaman modal dalam lingkup tugas dan fungsi BKPM. Banyak persoalan menghadang, namun di sisi lain terdapat banyak potensi, kekuatan dan peluang yang dimiliki Indonesia untuk meningkatkan daya saing penanaman modal. Uraian berikut ini menegaskan kembali beberapa pokok perhatian berkaitan dengan potensi dan permasalahan dalam bidang penanaman modal, yang merupakan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Renstra BKPM 2010-2014.

1.2.1. Potensi

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, elaborasi aspek potensi digali dari dalam tubuh BKPM sendiri berkaitan dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam periode 2010-2014. Selanjutnya identifikasi potensi lingkungan di luar BKPM, baik hubungan antar lembaga dalam kaitannya dengan tugas koordinasi dan harmonisasi maupun kondisi perekonomian nasional.

Pertama, kemajuan di bidang peraturan perundang-undangan telah membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas dan fungsi BKPM sehingga dapat memainkan peran yang lebih baik dalam menggerakkan sektor penanaman modal dalam lima tahun mendatang. Periode dua tahun terakhir

sejak dikeluarkannya UU Nomor 25 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 90 Tahun 2007 cukup memberikan waktu bagi BKPM untuk melakukan konsolidasi internal dan sosialisasi eksternal. Tugas merumuskan kebijakan, koordinasi dan harmonisasi dengan instansi teknis dan Pemda diharapkan dapat berjalan lebih baik. Dengan semangat peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha yang menjadi salah satu prioritas dalam RPJMN 2010-2014, setiap lembaga dan daerah mestinya dapat bekerja secara sinergis untuk kepentingan nasional. Meski pernyataan ini bersifat normatif dan terdengar klasik, namun upaya penyediaan kerangka regulasinya sudah menampakkan hasil yang diantaranya dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal. PTSP di bidang penanaman modal diyakini menjadi salah satu instrumen kebijakan yang efektif untuk meningkatkan daya saing penanaman modal.

Kedua, kemajuan di bidang tata kelola, kompetensi SDM, dan kecukupan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur BKPM. Dinamika lembaga BKPM yang telah mengalami berbagai perubahan kebijakan sejak awal orde baru telah menempa kematangan BKPM sebagai sebuah entitas mandiri di bidang penanaman modal. Berbagai indikator kemajuan diantaranya dengan meningkatnya kecepatan dan kesederhanaan pelayanan PMA dan PMDN melalui penyediaan sistem operasi standar dan dengan dukungan infrastruktur teknologi informasi yang terus dimutakhirkan. Sementara itu, capaian kinerja yang menggembirakan selama periode 2005-2009 makin memberikan keyakinan akan kapasitas lembaga dan kompetensi aparturnya. Didukung dengan lingkungan kantor dengan fasilitas gedung yang sangat memadai, telah tumbuh etos dan budaya kerja aparatur yang sangat penting bagi upaya pencapaian tujuan-tujuan BKPM.

Ketiga, keluarnya Perpres Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di bidang penanaman modal dipandang sebagai momentum peningkatan kualitas pelayanan, koordinasi, dan harmonisasi kebijakan dengan instansi teknis dan Pemda. Artinya, terdapat iklim kerja yang lebih kondusif dan regulatif bagi instansi lain dan daerah, sehingga membuka jalan lebih lebar bagi tercapainya tugas-tugas koordinasi yang dijalankan BKPM. Diharapkan, dengan adanya peraturan ini, hambatan-hambatan yang bersifat kepentingan sektoral dan kedaerahan dapat secara bertahap diatasi. Dalam konteks ini, BKPM di antaranya berkewajiban untuk membangun norma, standar dan prosedur pelayanan di bawah sistem PTSP di bidang penanaman modal, termasuk memfasilitasi pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal di daerah. Dengan demikian, terdapat indikator kinerja yang terukur yang berguna bagi instansi lain dan Pemda dalam melakukan hubungan koordinasi dengan BKPM.

Keempat, kondisi likuiditas nasional yang berlimpah diyakini akan menjadi salah satu pemicu pertumbuhan PMDN ke depan. Meski pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan bukan menjadi bagian dari target BKPM, namun aliran/kredit akan turut memicu kegiatan langsung dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sejauh ini, aktiva produktif perbankan nasional masih banyak tersimpan dalam bentuk surat berharga pemerintah atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Di sisi lain, pembiayaan dari lembaga dana pensiun, perusahaan efek, dan perusahaan asuransi masih terbilang tinggi, ditandai dengan permintaan lebih terhadap setiap penerbitan surat utang korporasi (obligasi) di pasar modal pada 2009. Potensi likuiditas nasional yang tinggi ini sebenarnya dapat mengalir ke proyek-proyek PMDN tanpa diketahui dengan pasti sumber pembiayaannya, lebih-lebih bagi proyek-proyek yang dijalankan oleh sebuah grup usaha. Misalnya, kredit/obligasi diterima oleh perusahaan induk, namun kemudian dananya digunakan oleh perusahaan anak atau perusahaan yang berperan sebagai SPV (*Special Purpose Vehicle*) untuk kegiatan PMDN.

Kelima, keyakinan akan pertumbuhan ekonomi nasional yang positif di atas lima persen dalam tahun-tahun mendatang merupakan cerminan potensi makro ekonomi Indonesia yang tetap baik di tengah ketidakpastian pemulihan perekonomian pasca krisis keuangan. Perekonomian Indonesia terbukti tangguh menghadapi gejolak internasional dan memiliki daya saing dibanding negara-negara lain sekawasan. Di sisi lain, dalam dua tahun terakhir peringkat daya saing nasional yang diterbitkan berbagai lembaga internasional bergerak naik. Agenda reindustrialisasi telah menjadi komitmen nasional yang diusung pemerintah maupun praktisi bisnis. Fakta-fakta tersebut memberikan sinyal positif akan potensi pertumbuhan aliran PMA dalam lima tahun mendatang.

1.2.2. Permasalahan

Seiring dengan potensi penanaman modal yang masih tinggi, perbaikan-perbaikan masih tetap diperlukan terhadap permasalahan yang dihadapi saat ini yang belum sepenuhnya ideal untuk merealisasikan agenda 2010-2014.

Pertama, di tubuh BKPM, diperlukan satuan tugas atau kualitas aparatur yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai untuk menjawab tantangan perubahan lingkungan eksternal yang berlangsung dinamis. Program-program peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana yang telah berjalan sebagian besar bersifat generik untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur. Peran Pusdiklat masih sangat terbatas, baik dalam hal sarana maupun

substansi pendidikan-pelatihan yang lebih diarahkan untuk kepentingan pengembangan aspek struktural dan kemampuan teknis aparatur. BKPM membutuhkan pusat pendidikan-pelatihan yang mampu mencetak aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk menciptakan inovasi dan kreatifitas yang dibutuhkan dalam menyikapi persaingan penanaman modal global yang makin tajam. Bila tidak, diperlukan program-program pendidikan-pelatihan ekstra untuk tujuan tersebut. Misalnya, peningkatan daya saing pelayanan penanaman modal akan efektif bila didasari preferensi penanam modal yang lebih baik dibanding praktik sejenis di negara-negara lain.

Hal di atas berkaitan dengan area-area penting, seperti dalam hal perencanaan, penetapan strategi dan teknik promosi penanaman modal di luar negeri, rumusan kebijakan fasilitas-insentif, dan kerjasama penanaman modal. BKPM memerlukan kerangka kerja *market intelligence* untuk memetakan potensi dan lalu lintas penanaman modal internasional. Ini menuntut pemahaman dalam hal praktik lembaga, pasar keuangan, aksi korporasi (*merger* dan akuisisi), dan aspek hukum bisnis internasional.

Kedua, menginjak implementasi sistem PTSP di bidang penanaman modal pada 2010, kondisi yang ada belum sepenuhnya siap berjalan, utamanya bagi instansi sektoral dan daerah. Ego sektoral dipandang masih akan mewarnai dalam tahun-tahun pertama Renstra 2010-2014, karena bidang penanaman modal merupakan kegiatan lintas instansi. Peringkat daya saing nasional masih sangat rendah dibanding negara-negara sekawasan, yang menunjukkan portofolio permasalahan masih terbilang tinggi. Masing-masing lembaga dan daerah merasa memiliki wewenang dalam memajukan kegiatan penanam modal. Kepentingan daerah dalam era otonomi sangat tinggi untuk membangun kemampuannya mengelola perekonomiannya sendiri. Tumpang tindih wewenang dan banyaknya kepentingan masih menjadi salah satu sumber permasalahan. Ini juga berkaitan dengan masih lemahnya kerangka pikir yang probisnis di tubuh banyak lembaga pemerintahan.

Ketiga, ketimpangan secara kewilayahan maupun sektoral terbilang tinggi, sehingga memerlukan waktu panjang untuk mengatasinya. Arah kebijakan dan strategi untuk mendorong pemerataan penanaman modal memerlukan pendekatan kebijakan secara mendasar, sistematis dan padu-nasional. Diperlukan kebijakan yang lebih agresif untuk membuka hambatan-hambatan di luar Jawa, seperti penyediaan infrastruktur (seperti jalan raya dan pelabuhan), pasokan energi, dan perbaikan birokrasi yang probisnis, baik di pusat maupun daerah. Sementara ketimpangan secara sektoral merupakan sifat alamiah dari kegiatan bisnis yang harus dikurangi melalui kebijakan yang lebih

mendorong secara terintegrasi dari hulu sampai hilir. Pendekatan industri yang terintegrasi merupakan salah satu strategi kebijakan untuk lebih pemeratakan secara sektoral, seperti dalam sektor agribisnis-agroindustri, kehutanan, dan kelautan.

Keempat, daya saing nasional yang masih rendah berkait dengan iklim penanaman modal yang menciptakan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). WEF (2009) dalam laporannya mengurai beberapa permasalahan penanaman modal di Indonesia. Satu paling utama adalah inefisiensi birokrasi pemerintah. Selain inefisiensi birokrasi pemerintah, masalah lainnya terkait dengan minimnya ketersediaan dan buruknya kualitas infrastruktur, korupsi, serta regulasi perburuhan yang kaku. Minimnya ketersediaan dan buruknya kualitas infrastruktur di Indonesia disebabkan terbatasnya alokasi anggaran pemerintah. Indonesia hanya mengalokasikan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bawah 4 persen dari PDB per tahun, setara dengan Kamboja dan Filipina. Sebagai perbandingan, Laos dan Mongolia mengalokasi sekitar 4 persen hingga 7 persen dari PDB per tahunnya untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan China, Thailand dan Vietnam mengalokasikan dana lebih dari 7 persen dari PDB. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur ini pulalah yang menjadi alasan utama minimnya penanaman modal di luar Jawa. Pembangunan infrastruktur juga berkait dengan sinergi kebijakan tentang tata ruang nasional dan daerah, insentif yang memadai seputar pemilikan tanah, keringanan pajak, atau berbagai skim kemitraan pemerintah-swasta (*public-private partnership*) yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan penanam modal.

a. Kelemahan

Banyak faktor kelemahan yang harus diatasi baik secara internal BKPM maupun lingkungan eksternal.

Pertama, di tengah tuntutan akan peningkatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan, secara internal BKPM menyadari masih terdapat kelemahan kualitas sumberdaya manusia untuk menopang kualitas kajian dan perumusan kebijakan secara teknokratik dan visioner. Dinamika kegiatan penanaman modal, perdagangan dan keuangan berjalan secara cepat dan terus berubah. Misalnya, bagaimana memahami secara benar dan kritis akan fenomena krisis keuangan global yang telah menyeret kebangkrutan banyak korporasi internasional, memangkas kemampuan anggaran pembangunan negara-negara maju, dan karena itu berakibat menurunkan volume antar negara. Di samping itu, tidak

kalah pentingnya adalah pemahaman akan lalu lintas portofolio, pasar keuangan, dan karakteristik pemodal, yang secara langsung maupun tak langsung berpengaruh terhadap iklim persaingan dan lalu lintas penanaman modal dunia. Di sisi lain, memahami kepentingan sektoral yang harus dikonsolidasikan dalam kebijakan yang disusun BKPM adalah bukanlah tugas yang ringan. Misalnya, dalam menyusun RUPM, BKPM perlu mempertimbangkan seluruh agenda penanaman modal yang menjadi otoritas teknis, seperti di sektor strategis yaitu pangan, energi dan infrastruktur.

Kedua, peran BKPM sebagai perumus kebijakan di bidang penanaman modal belum sepenuhnya direspons secara proaktif oleh instansi teknis dan Pemda. Usulan/kajian kebijakan yang dilakukan BKPM belum menjadi salah satu konsiderasi penting bagi penetapan produk-produk kebijakan instansi/daerah di bidang penanaman modal. Ada sebuah kesenjangan proses untuk membangun struktur kebijakan yang padu-nasional berkait dengan masih tingginya kepentingan sektoral. Hal ini utamanya terjadi dalam proses persetujuan perluasan usaha (ekspansi) sebuah proyek penanaman modal, baik dalam kegiatan industri maupun perdagangan, proses *merger* dan akuisisi, dan peralihan status penanaman modal asing akibat aksi korporasi pembelian saham di bursa. Misalnya, dalam rangka perluasan kegiatan penanaman modal di daerah seperti yang dilakukan gerai hipermarket asing, regulasi daerah dan kebijakan instansi teknis di pusat belum dapat terkonsolidasi dengan kebijakan BKPM. Demikian halnya dengan proses *merger*, akuisisi, dan pengambilalihan saham di bursa, banyak proses administratif oleh instansi teknis yang belum dapat diakses oleh BKPM untuk kepentingan pengendalian dan pembinaan kegiatan penanaman modal. Dalam beberapa contoh kasus di atas, peran BKPM semata terbatas dalam aspek administratif persetujuan atau perubahan rencana penanaman modal.

Ketiga, dalam upaya meningkatkan daya saing dan iklim usaha, indikator-indikator yang menentukan sesungguhnya lebih banyak terletak pada otoritas teknis. Misalnya, indikator yang berkait dengan ketenagakerjaan, perpajakan, sistem devisa, kepastian hukum berkait hak atas kekayaan intelektual, hak atas tanah, dan lain-lain, berada di luar otoritas BKPM. Artinya, bila masih terdapat tumpang tindih kewenangan dan kepentingan, maka arah peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha akan sulit dicapai. Diharapkan, sistem PTSP di bidang penanaman modal dapat mengatasi persoalan ini, dimana setiap otoritas teknis dapat melimpahkan tugas dan kewenangannya kepada BKPM. Di sisi lain, perumusan kebijakan dan harmonisasi dalam banyak isu seperti tersebut di atas, sejauh ini masih berjalan

secara sektoral. Keadaan ini bukan saja akan terus menimbulkan terjadinya benturan kebijakan, namun dinilai kurang produktif dan tidak mendukung tujuan efisiensi anggaran nasional.

Keempat, belum terciptanya integritas kebijakan di bidang penanaman modal yang di antaranya disebabkan terbatasnya otoritas BKPM. Minimnya integritas kebijakan penanaman modal dapat diamati dari banyaknya peraturan pusat maupun daerah yang tidak sejalan dengan arah pengembangan penanaman modal. Kondisi tersebut semakin jelas ketika menjamurnya Perda. Data Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (2009) menyebutkan, hingga 2009 telah ada 13.387 Perda. Sekitar 9.772 Perda telah direvisi, 3.513 dibatalkan. Selama 2009 saja sekitar 668 Perda dibatalkan.

Kelima, di luar isu yang berkait dengan kelembagaan dan kualitas sumberdaya internal BKPM seperti disebutkan di atas, kelemahan mendasar sektor penanaman modal terletak pada kinerja makroekonomi nasional itu sendiri. Bahwa pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga dari tahun ke tahun dinilai belum meletakkan fondasi yang kuat bagi kelangsungannya dalam jangka panjang. Keuangan negara belum mampu mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, sanitasi, dan pendidikan yang memadai. Struktur industri rapuh dan mengarah ke deindustrialisasi sejak sekitar tiga tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi belum dapat mengatasi penurunan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan. Dalam konteks ini, sektor penanaman modal memikul beban berat untuk berperan menjawab agenda-agenda nasional tersebut, padahal fakta di atas justru banyak berkebalikan dengan tuntutan daya saing penanaman modal. Misalnya, keterbatasan infrastruktur merupakan salah satu hambatan yang utama dan menjadi penentu upaya pemerataan penanaman modal. Seperti bergerak dalam lingkaran yang tak diketahui ujung pangkalnya, peningkatan penanaman modal dan daya saing nasional memerlukan banyak terobosan inovasi kebijakan, kalau tidak memerlukan waktu yang panjang untuk mewujudkannya.

b. Peluang

Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk memanfaatkan penanaman modal sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena Indonesia tetap dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki daya tarik penanaman modal tinggi. Di sisi lain, Indonesia menyediakan beragam sektor penanaman modal. Peluang besar lainnya terungkap dari semakin dominannya peran Indonesia dalam diplomasi antar negara. Secara perlahan,

Indonesia mulai diperhitungkan dalam forum-forum ekonomi maupun politik dunia seperti G-20. Sebagai informasi, G-20 merupakan kumpulan negara-negara yang menguasai 85 persen PDB dunia dan mewakili dua per tiga populasi penduduk dunia. Sementara itu, peluang lainnya muncul dari terpilihnya kembali Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden. Kondisi ini dapat memberikan gambaran kepastian dan kesinambungan program-program ekonomi yang sangat penting dipertimbangkan dalam kegiatan penanaman modal oleh pihak swasta.

Ketika dunia dilanda krisis keuangan global, portofolio baik surat berharga maupun langsung akan cenderung beralih ke negara-negara yang dinilai memiliki prospek ekonomi yang tinggi. Indonesia terbukti dapat memelihara kondisi perekonomiannya tetap sehat dan relatif menarik untuk kegiatan . Masalahnya adalah ketika sumber-sumber dari negara-negara yang dikenal selama ini seperti Jepang, Uni Eropa dan Amerika Serikat, dilanda krisis dan mengalami kontraksi perekonomian, maka peluang yang dapat diperoleh Indonesia diharapkan dari negara-negara yang sedang bertumbuh, seperti kawasan Timur Tengah dan China. Hal ini membawa pesan bahwa peluang penanaman modal harus dimanfaatkan melalui diversifikasi negara-negara penanam modal yang tidak terkena dampak krisis, sehingga prospek peningkatan penanaman modal dapat dicapai.

c. Tantangan

Ketidakpastian gejolak eksternal yang masih tinggi menjadi tantangan utama kegiatan penanaman modal, khususnya PMA. Beberapa pokok perhatian diuraikan berikut ini.

Pertama, fluktuasi harga-harga komoditas strategis di pasar dunia yang berpengaruh langsung terhadap makroekonomi nasional, seperti harga minyak dan pangan, termasuk praktik spekulasi di pasar keuangan global yang telah terbukti dapat merontokkan aktivitas di sektor riil. Perekonomian domestik harus dikelola secara *sustain* dan terhindar dari praktik spekulasi di pasar global. Prioritas peningkatan produksi minyak dan bahan bakar alternatif, serta upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional menjadi agenda nasional yang harus terus diupayakan.

Kedua, implementasi fakta perdagangan regional dan internasional di bawah payung *World Trade Organisation* (WTO), *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) dan *ASEAN-Free Trade Area* (AFTA) akan membuka liberalisasi perdagangan yang kian bebas dengan tingkat persaingan yang makin

tinggi menginjak 2010. Konteks daya saing bukan saja ditujukan untuk menarik kegiatan penanaman modal, melainkan lebih luas dalam kerangka menciptakan perekonomian domestik yang tangguh dan produk ekspor yang berdaya saing di tengah pergaulan dunia yang kian terbuka.

Ketiga, dampak krisis keuangan global telah menyebabkan perubahan regulasi di berbagai negara dan kebijakan proteksi yang kian intensif. Upaya pemulihan dari krisis yang dilakukan negara-negara dengan dampak krisis terbesar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, tidak serta merta dapat menggenjot pertumbuhan perekonomian dunia. Langkah-langkah penyelamatan korporasi seperti *bailout* dan rekapitalisasi lembaga keuangan hanya akan mengembalikan struktur keuangan (kecukupan modal) pada level yang memadai, namun tidak untuk menyuntikkan modal kerja. Artinya, lembaga keuangan dunia masih akan dihadapkan pada kesulitan likuiditas yang parah meski upaya intervensi pemerintah-otoritas setempat telah dilakukan. Dengan demikian, para pemodal asing akan menghadapi kesulitan sumber-sumber pendanaan dalam lima tahun mendatang. Pemulihan ekonomi berarti meletakkan prioritas pada pengembangan perekonomian domestik, tak terkecuali negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD. Keadaan ini akan semakin menekan keringnya lalu lintas modal dunia dan berakibat pada menurunnya lalu lintas kegiatan penanaman modal asing. Akibatnya dapat diterka, yaitu makin sengitnya persaingan negara-negara berkembang untuk mendapatkan aliran modal masuk. Karena itu, peningkatan daya saing penanaman modal menjadi agenda penting dan strategis yang menjadi arah kebijakan BKPM dalam lima tahun mendatang.

Keempat, tantangan perwujudan reformasi birokrasi di berbagai lini untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mampu bekerja secara profesional untuk menjawab tantangan perekonomian yang makin meningkat. Dalam bidang penanaman modal yang bersifat lintas instansi, agenda nasional ini menduduki urgensi dan kepentingan yang sangat tinggi. Bila tidak, maka integritas kebijakan di bidang penanaman modal akan sulit dicapai. Dalam konteks ini, BKPM bertekad untuk secara konsisten dan bersungguh-sungguh melakukan reformasi birokrasi sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung pelaksanaan tugas koordinasi, perumusan dan harmonisasi kebijakan di bidang penanaman modal.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1 Visi

Visi BKPM dalam periode 2010-2014 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian nasional”.

Pernyataan visi di atas mengandung dua frase kunci, yaitu “daya saing penanaman modal” dan “kualitas perekonomian nasional”. Semangat peningkatan daya saing dan kontribusi bagi perekonomian yang berkualitas merupakan artikulasi dari pertimbangan-pertimbangan teknokratik dan visioner untuk mendukung terwujudnya prioritas nasional dalam peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha di Indonesia sesuai RPJMN 2010-2014. Daya saing nasional, khususnya penanaman modal sampai kini masih rendah, dan akan menemui berbagai tantangan internal serta persaingan lingkungan eksternal yang tendensinya kian menguat. Sementara spirit kualitas perekonomian dimaknai sebagai capaian kinerja ekonomi nasional yang secara umum ditandai dengan peningkatan dan pemerataan penanaman modal serta peningkatan kontribusi penanaman modal terhadap pembentukan PDB. Arah peningkatan kualitas perekonomian tersebut tentu saja bukan merupakan target yang hendak dicapai BKPM secara kelembagaan, melainkan cita-cita BKPM untuk berperan lebih besar dalam menunjang tercapainya kualitas perekonomian nasional yang lebih baik. Dengan demikian, fokus prioritas BKPM dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan menurut visi di atas adalah peningkatan daya saing penanaman modal.

Salah satu ukuran daya saing nasional dalam kancah internasional adalah kemudahan berusaha *-ease of doing business-* versi *World Bank*. Harus dicatat, bahwa kriteria daya saing versi *World Bank* terkait dengan tugas dan fungsi lintas instansi dan Pemda; capaian kinerja daya saing bukan sepenuhnya berada dalam lingkup tugas dan fungsi BKPM. Meski demikian, BKPM mengambil sikap proaktif untuk mengambil posisi terdepan dalam setiap program untuk meningkatkan daya saing penanaman modal dan bisnis. Setiap instansi dan Pemda mesti membuka diri akan pentingnya berbagai indikator daya saing yang perlu secara bersama-sama diperbaiki.

Suatu perkembangan positif bagi BKPM adalah telah dikeluarkannya Perpres Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di bidang penanaman modal. Berdasarkan Perpres ini, BKPM menyelenggarakan sistem PTSP di bidang penanaman modal di pusat, dan untuk itu BKPM akan menerima pelimpahan wewenang tentang perizinan dan non perizinan dari instansi teknis dan Pemda terkait penanaman modal yang menjadi urusan pusat. Di samping itu, BKPM berwenang menetapkan norma, standar dan prosedur serta kelayakan operasi sistem PTSP di bidang penanaman modal yang dijalankan Pemda. Pelayanan perizinan menduduki peran penting dan strategis dalam upaya peningkatan daya saing penanaman modal.

Kendala BKPM untuk mencapai visi di atas adalah terbatasnya kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi kebijakan penanaman modal. Visi sulit diwujudkan bila rumusan kebijakan yang diajukan BKPM pada akhirnya diputuskan oleh instansi lain yang boleh jadi tidak memiliki pandangan dan strategi yang sepenuhnya padu. Di samping itu, dalam tataran penyusunan peraturan pelaksanaan sebuah undang-undang atau peraturan pemerintah, terbuka kemungkinan untuk menafsirkannya menurut kepentingan dan cara pandang yang berbeda-beda. Karena itu, sasaran harmonisasi kebijakan di pusat, antara pusat dengan daerah, dan antar daerah di bidang penanaman modal yang akan terus diupayakan oleh BKPM masih akan menghadapi tantangan berat di lapangan. Di sinilah pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan BKPM yang memungkinkan memiliki kewenangan lebih besar dalam pengambilan keputusan di bidang penanaman modal yang bersifat lintas instansi dan dengan Pemda.

2.2 Misi

Misi merupakan pernyataan tentang apa-apa yang akan dilakukan untuk merealisasikan visi. Misi dapat berisi penggambaran tujuan suatu organisasi dengan jelas dan fokus terhadap sasaran yang ingin dicapai ke depan.

Sesuai dengan visi 2010-2014, misi BKPM meliputi tiga hal berikut:

- 1) Mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal;
- 2) Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.

Pernyataan Misi-1 membawa pesan peningkatan penanaman modal yang dibarengi dengan pemerataan secara sektoral dan kewilayahan, serta dengan tidak mengesampingkan pentingnya penciptaan nilai tambah ekonomi yang

tinggi untuk menunjang perekonomian. Dengan demikian, perekonomian dapat tumbuh lebih berkualitas karena *multiplier effect* ekonomi dapat menjangkau lintas sektor dan wilayah. Pemerataan secara sektoral berarti upaya untuk meningkatkan volume penanaman modal di sektor primer yang sejauh ini tertinggal dibanding sektor sekunder dan tersier. Namun untuk tujuan penciptaan nilai tambah ekonomi, penanaman modal di sektor sekunder dan tersier tidak boleh diabaikan. Prioritas penanaman modal yang bersifat industri yang terintegrasi (*integrated industry*) menjadi salah satu alternatif terbaik untuk mencapai pemerataan penanaman modal tanpa kehilangan nilai tambah ekonomi. Dengan cara ini, daya saing industri dan produk-produknya dapat terjaga. Upaya tersebut dapat dicapai dengan mengusahakan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan dalam kegiatan penanaman modal. Dalam konteks ini pula, pengembangan penanaman modal di KEK menjadi bagian penting dari agenda BKPM dalam lima tahun ke depan.

Pernyataan Misi-2 mendorong dilakukannya deregulasi kebijakan, harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal. Kebijakan yang dirumuskan BKPM akan dilakukan dalam kerangka penyederhanaan dan efisiensi pelayanan penanaman modal, termasuk rumusan kebijakan insentif yang menarik. Pendekatan ini pula yang akan menjiwai langkah-langkah harmonisasi kebijakan antara instansi di tingkat pusat, pusat dengan daerah, dan antar daerah. Untuk itu, peran koordinasi yang dijalankan BKPM penting. Keselarasan dan kesederhanaan kebijakan antar instansi akan berimplikasi pada membaiknya indikator daya saing penanaman modal. Daya saing penanaman modal salah satunya ditandai dengan adanya kepastian hukum untuk menunjang keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Harmonisasi kebijakan memiliki arti penting dalam penyusunan sistem pelayanan yang menjamin segi-segi kecepatan, kesederhanaan, dan terhindar dari ekonomi biaya tinggi. Pelayanan penanaman modal yang semakin cepat dan efisien, sistem informasi yang semakin luas dan *borderless*, akses data yang semakin cepat dan akurat, serta berbagai kemajuan kinerja kelembagaan lainnya, adalah beberapa indikator yang sangat erat kaitannya dengan tercapainya harmonisasi kebijakan.

Pernyataan Misi-3 mengandung semangat peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dalam segala manifestasinya, diantaranya terkait dengan penyusunan norma, standar dan prosedur; kualitas dan kompetensi aparatur, serta dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sistem pelayanan yang akan dikembangkan utamanya berpijak pada sistem PTSP di bidang penanaman modal sesuai Perpres Nomor 27 Tahun 2009 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. BKPM akan berperan sebagai pelaksana sistem

PTSP di bidang penanaman modal di pusat, dan melakukan fasilitasi penyelenggaraan sistem PTSP di bidang penanaman modal di daerah. Dalam lingkup internal BKPM akan terus dikembangkan SPIPISE.

Sistem pelayanan mencakup perizinan dan nonperizinan serta pemberian fasilitas insentif penanaman modal. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan indikator utama pencapaian daya saing penanaman modal. Sistem pelayanan yang efektif dan efisien, serta terhindarnya dari benturan kepentingan, menjadi pertimbangan pokok calon penanam modal. Adanya fasilitas-insentif penanaman modal yang semakin kompetitif akan mendorong daya saing dan meningkatkan minat pemodal baik dari dalam dan luar negeri. Upaya pemerataan penanaman modal bisa ditempuh melalui insentif kemudahan penanaman modal di luar Jawa dan atau penanaman modal pada sektor hulu/primer. Di sisi lain, perlu dilakukan terobosan skim-skim pembiayaan pembangunan infrastruktur yang semakin inovatif untuk memecahkan permasalahan hambatan penanaman modal di luar Jawa. Wilayah luar Jawa dikenal kaya sumber daya alam, tetapi kurang memiliki sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan perekonomian. Terbatasnya infrastruktur merupakan hambatan penanaman modal yang belum teratasi sepenuhnya hingga kini, dan menjadi salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014. Sehubungan dengan adanya beberapa isu strategis yaitu (i) Perkembangan realisasi dan penyesuaian target penanaman modal, (ii) penyebaran penanaman modal, dan (iii) peran baru BKPM dalam memfasilitasi dan memberikan dukungan pelaksanaan percepatan realisasi proyek-proyek KPS di Bidang Infrastruktur maka telah dilakukan penajaman pada tujuan dan sasaran strategis Renstra BKPM 2010-2014.

2.3 Tujuan

Tujuan menggambarkan keadaan yang ingin dicapai oleh BKPM dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan mensyaratkan adanya konsistensi dengan tugas dan fungsi, serta satu lini dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya merealisasikan misi. Mencermati Buku Pedoman Penyusunan Renstra yang dikeluarkan Bappenas (2009), tujuan menunjukkan *impact* atau kinerja K/L.

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi seperti telah diuraikan dalam Bab 1 dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi BKPM. Pernyataan tujuan harus dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya. Sasaran strategis

dilengkapi dengan target kinerja sehingga menjadi ukuran keberhasilan dari pencapaian visi dan misi K/L.

Kriteria penentuan tujuan K/L sesuai ketentuan Bappenas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan harus sejalan dengan visi dan misi organisasi K/L dan berlaku pada periode jangka menengah;
- b. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah;
- c. Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh K/L;
- d. Tujuan harus dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi K/L.

Sesuai visi dan misi, tujuan BKPM dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal nasional;
- 2) Meningkatnya citra Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal yang kondusif dan minat akan potensi penanaman modal yang prospektif;
- 3) Meningkatnya pelayanan di bidang penanaman modal;
- 4) Meningkatnya iklim penanaman modal, pengembangan potensi daerah, dan pemberdayaan usaha nasional;
- 5) Meningkatnya perencanaan penanaman modal yang terintegrasi dan terkoordinasi;
- 6) Meningkatnya posisi tawar, kerjasama, dan implementasi hasil-hasil kesepakatan di bidang penanaman modal;
- 7) Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di BKPM serta pengadaan sarana dan prasarana aparatur BKPM yang diarahkan bagi peningkatan daya saing penanaman modal.

2.4 Sasaran Strategis

Bila tujuan menggambarkan keadaan yang ingin dicapai oleh BKPM dalam jangka waktu lima tahun ke depan, maka sasaran strategis merupakan ukuran-ukuran spesifik yang menjelaskan sejauh mana tujuan itu telah dicapai. Mencermati Buku Pedoman Penyusunan Renstra yang dikeluarkan Bappenas

(2009), tujuan menunjukkan *impact* atau kinerja K/L, sedangkan sasaran strategis menunjukkan indikator kinerja K/L.

Sebagai indikator kinerja BKPM, sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal nasional yang berorientasi pada kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan penanaman modal;
- 2) Meningkatnya minat penanaman modal melalui efektivitas kegiatan promosi yang tepat sasaran;
- 3) Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang penanaman modal;
- 4) Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal, pengembangan potensi daerah, dan pemberdayaan usaha nasional;
- 5) Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang terintegrasi dan terkoordinasi baik lintas sektor maupun lintas daerah;
- 6) Meningkatnya kerjasama di bidang penanaman modal;
- 7) Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sesuai RPJMN 2010-2014, prioritas nasional di bidang penanaman modal adalah peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha, dengan arah kebijakan nasional sebagai berikut:

- 1) Menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing;
- 2) Meningkatnya realisasi penanaman modal di seluruh wilayah Indonesia.

Sedangkan strategi yang akan ditempuh adalah:

- 1) Mendorong berkembangnya penanaman modal di sektor primer, sekunder, dan tersier melalui penyusunan perencanaan yang lebih berkualitas, penyusunan usulan kebijakan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal.
- 2) Mendorong berkembangnya penanaman modal berbasis keunggulan daerah dalam rangka persebaran penanaman modal di seluruh wilayah Indonesia dan perluasan kesempatan kerja;

- 3) Mendorong efektivitas pelaksanaan kebijakan penanaman modal melalui harmonisasi dan simplifikasi berbagai perangkat peraturan baik di pusat maupun di daerah;
- 4) Mendorong dan memfasilitasi percepatan ketersediaan infrastruktur dalam arti luas melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan kemitraan pemerintah dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan daya tarik penanaman modal.

Adapun kegiatan prioritas nasional sesuai arahan presiden yang dengan lingkup tugas pokok dan fungsi BKPM adalah:

- 1) Kepastian hukum, melalui kegiatan peningkatan deregulasi kebijakan di bidang penanaman modal;
- 2) Penyederhanaan prosedur, melalui dua kegiatan berikut ini:
 - a. Pengembangan SPIPISE;
 - b. Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal;
- 3) KEK, melalui kegiatan pengembangan penanaman modal di KEK dan pembentukan perangkat, kebijakan dan strategi pengembangan KEK.
- 4) Fasilitasi Percepatan Realisasi Proyek-Proyek Infrastruktur KPS.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BKPM

Arah kebijakan dan strategi BKPM memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti dalam jangka menengah guna tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BKPM.

Arah kebijakan BKPM adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian nasional dan mendukung pembangunan berkelanjutan;
- 2) Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global;
- 3) Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, peningkatan perekonomian daerah, dan pengembangan kemitraan penanaman modal dengan sektor UKM untuk meningkatkan daya saing penanaman modal;
- 4) Memperkuat kapasitas kelembagaan, khususnya melalui peningkatan kapasitas aparatur BKPM dan restrukturisasi organisasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BKPM.

Sedangkan strategi yang akan ditempuh BKPM adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal;
- 2) Meningkatkan penanaman modal yang menciptakan nilai tambah;
- 3) Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas promosi penanaman modal dengan mengedepankan daya saing nasional;
- 5) Meningkatkan kerja sama penanaman modal dengan mengedepankan kepentingan nasional;
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penanaman modal;
- 7) Merumuskan dan merekomendasikan kebijakan fasilitas dan insentif penanaman modal.
- 8) Meningkatkan koordinasi di tingkat pusat, antara pusat dan daerah, dan antardaerah di bidang penanaman modal;
- 9) Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal;
- 10) Meningkatkan realisasi, mendorong persebaran penanaman modal, dan mendorong berkembangnya kemitraan penanaman modal dengan UKM.
- 11) Menyusun rumusan dan rekomendasi kebijakan penanaman modal yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Adapun program yang hendak dijalankan meliputi dua program teknis dan dua program generik.

Program teknis:

- 1) Peningkatan daya saing penanaman modal.

Program generik:

- 1) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKPM;
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur BKPM.

Arah kebijakan dan strategi dilengkapi dengan indikator kinerja program sebagai ukuran pencapaian kinerja lembaga. Secara lebih spesifik indikator tersebut mencerminkan *outcome* atas program lembaga.

Berikut ini indikator kinerja program BKPM:

- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal nasional yang berorientasi pada kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan penanaman modal,

yang diukur dari nilai realisasi penanaman modal;

- 2) Meningkatnya minat penanaman modal melalui efektivitas kegiatan promosi yang tepat sasaran, yang diukur dari:
 - a. Jumlah strategi promosi penanaman modal;
 - b. Jumlah minat penanaman modal di dalam dan luar negeri sebagai respon terhadap penyelenggaraan promosi.
- 3) Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang penanaman modal yang diukur dari waktu penyelesaian pelayanan penanaman modal yang sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP).
- 4) Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal, pengembangan potensi daerah, dan pemberdayaan usaha nasional, yang diukur dari:
 - a. Jumlah usulan kebijakan peningkatan iklim penanaman modal yang mendukung peningkatan dan persebaran penanaman modal;
 - b. Jumlah daerah yang menerapkan PTSP di bidang penanaman modal yang terintegrasi dengan SPIPISE.

- 5) Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang terintegrasi dan terkoordinasi baik lintas sektor maupun lintas daerah, yang diukur dari:
 - a. Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal yang mendukung peningkatan daya saing penanaman modal;
 - b. Jumlah hasil kajian penanaman modal yang berkualitas yang mendukung kebijakan sektoral dan daerah;
 - c. Jumlah fasilitasi percepatan realisasi proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS.
- 6) Meningkatnya kerjasama di bidang penanaman modal, yang diukur dari:
 - a. Jumlah rumusan posisi dan/atau nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama di bidang penanaman modal;
 - b. Jumlah fasilitasi dan pemantauan penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.
- 7) Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, yang diukur dari:
 - a. Jumlah administrasi kelembagaan sebagai dukungan manajemen;
 - b. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik;
 - c. Jumlah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja (Renja) BKPM;
 - d. Jumlah laporan pelaksanaan program/kegiatan BKPM di dalam maupun luar negeri;
 - e. Jumlah peraturan perundang-undangan yang dihimpun terkait dengan penanaman modal;
 - f. Jumlah kegiatan kehumasan;
 - g. Jumlah aparatur/pejabat struktural dan fungsional di pusat dan daerah yang dididik dan dilatih di bidang penanaman modal.

Uraian target pembangunan BKPM untuk tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Lampiran II, sementara uraian perkiraan kebutuhan pendanaan pembangunan tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Lampiran III.

3.3. Target Penanaman Modal

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program serta usulan kegiatan, maka ditetapkan target PMA dan PMDN periode 2010-2014. Target penanaman modal terdiri dari target persetujuan penanaman modal dan target realisasi penanaman modal. Target realisasi penanaman modal menjadi salah satu indikator penting kinerja BKPM, meskipun proses realisasi penanaman modal biasanya memerlukan waktu lebih dari dua tahun.

Untuk menghitung target penanaman modal, metode penghitungan realisasi penanaman modal sampai dengan tahun 2009 menggunakan metode angka realisasi penanaman modal berdasarkan Izin Usaha Tetap (IUT) atau izin untuk beroperasi, sehingga belum mencerminkan kontribusi penanaman modal pada tahun berjalan. Sejak tanggal 1 Januari 2010, data penanaman modal yang dilaporkan adalah data realisasi penanaman modal berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) baik PMA maupun PMDN yang diterima oleh BKPM.

Data realisasi penanaman modal berdasarkan LKPM adalah data kegiatan penanaman modal yang direalisasikan oleh perusahaan selama kurun waktu tahun berjalan pada tahun 2010. Sedangkan data realisasi berdasarkan Izin Usaha Tetap (IUT) adalah data kegiatan penanaman modal yang direalisasikan oleh perusahaan dalam kegiatan nyata yang sudah menghasilkan produksi barang/jasa dan perusahaan sudah memperoleh IUT dari pemerintah. Data penanaman modal dalam LKPM tidak menggambarkan seluruh kegiatan penanaman modal yang ada di Indonesia, sebab data penanaman modal tersebut tidak termasuk penanaman modal di sektor Minyak dan Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, penanaman modal yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/sector, penanaman modal portofolio (Pasar Modal) dan penanaman modal rumah tangga.

Target penanaman modal ditetapkan berdasarkan kinerja lima tahun sebelumnya, serta arah dan sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Selama periode 2005-2009, realisasi kegiatan PMA menunjukkan perkembangan signifikan. Dalam periode tersebut, realisasi PMA tumbuh rata-rata 30,4 persen per tahun. Pada tahun 2010, secara kumulatif realisasi penanaman modal PMDN – PMA selama setahun (Januari – Desember) sebesar Rp 208,5 triliun, apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2009 (sebesar Rp 135,1 triliun) terdapat peningkatan sebesar 54,2%. Sedangkan dibandingkan dengan target tahun 2010 (sebesar Rp 160,1 triliun), maka capaian sampai dengan akhir Desember 2010 tersebut sudah melebihi target sebesar 30,2%. Hal ini menunjukkan meningkatnya daya tarik perekonomian Indonesia bagi penanam modal asing.

Ke depan, tantangan yang dihadapi bagi kinerja penanaman modal adalah (i) ketatnya persaingan dalam perebutan dana penanam modal internasional. Meskipun perekonomian dunia diperkirakan membaik, namun dunia diperkirakan belum sepenuhnya pulih dari krisis yang bermula dari kekeringan likuiditas yang melanda perekonomian dunia pada akhir 2007; (ii) terjadinya perlambatan pertumbuhan industri manufaktur atau deindustrialisasi setelah krisis ekonomi 1997 yaitu pertumbuhan industri lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi; (iii) terjadinya bencana alam dan kebocoran reaktor nuklir di Jepang pada awal tahun 2011 diprediksikan penanaman modal dari Jepang akan berkurang. Mengingat dalam berapa tahun belakangan ini, para investor dari Jepang menempati posisi ke-4 besar dalam merealisasikan penanaman modalnya di Indonesia.

Di samping tantangan yang harus dihadapi, akhir-akhir ini perekonomian dunia mulai membaik, perbaikan perekonomian dunia bagi Indonesia melalui dua sisi. *Pertama*, pulihnya permintaan dari negara-negara yang terkena krisis akan meningkatkan kinerja ekspor. *Kedua*, di sisi lain, perbaikan perekonomian dunia akan mendorong aliran modal keluar (*capital outflow*) menuju kawasan Eropa Timur dan Amerika Serikat yang relatif lebih menarik.

Beberapa upaya untuk meningkatkan daya tarik perekonomian terus dilakukan antara lain menghapuskan berbagai hambatan bagi kegiatan penanaman modal. Berbagai agenda rinci pemerintah yang merupakan kristalisasi usulan program hasil *National Summit* yang antara lain diusulkan oleh penanam modal akan segera direalisasikan. Dengan membaiknya prospek perekonomian nasional serta dukungan lingkungan eksternal, maka target-target penanaman modal dapat direalisasikan.

Tabel 3.1
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010-2014 (dalam persen)

	Proyeksi Jangka Menengah RPJMN 2010-2014					Realisasi
	2010	2011	2012	2013	2014	2010
Pertumbuhan ekonomi	5,5-5,6	6,0-6,3	6,4-6,9	6,7-7,4	7,0-7,7	6,1
Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran (%)						
Konsumsi						
Masyarakat	5,2-5,3	5,2-5,3	5,3-5,4	5,3-5,4	5,3-5,4	4,6
Pemerintah	10,8-10,9	10,9-11,2	12,9-13,2	10,2-13,5	8,1-9,8	0,3
Investasi	7,2-7,3	7,9-11,2	12,9-13,2	10,2-12	11,7- 12,1	8,5
Ekspor	6,4-6,5	9,7-10,9	11,4-12,0	12,3-13,4	13,5- 15,6	14,9
Impor	9,2-9,3	12,7-15,2	14,3-15,9	15,0-16,5	16,0- 17,4	17,3
Pertumbuhan PDB Sisi Produksi (%)						
Pertanian	3,3-3,4	3,4-3,5	3,5-3,7	3,6-3,8	3,7-3,9	2,9
Industri Pengolahan	4,2-4,3	5,0-5,4	5,7-6,5	6,2-6,8	6,5-7,3	4,5
Lainnya	6,5-6,7	7,0-7,3	7,3-7,7	7,5-8,4	7,8-8,6	7,5
PDB per Kapita						
(US\$)	2.555	2.883	3.170	3.445	3.811	3.005
Riil Harga Konstan 2000(Ribu Rp)	9.785	10.255	10.790	11.389	12.058	9.723
Stabilitas Ekonomi						
Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%)	4,0-6,0	4,0-6,0	4,0-6,0	3,5-5,5	3,5-5,5	7,0
Nilai Tukar nominal (Rp/US\$)	9.750- 10.250	9.250- 9.750	9.250- 9.750	9.250- 9.850	9.250- 9.850	9087
Suku Bunga SBI 3 bln (%)	6,0-7,5	6,0-7,5	6,0-7,5	5,5-6,5	5,5-6,5	NA
Neraca pembayaran						
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)	7,0-8,0	11,0-12,0	12,5-13,5	13,5-14,5	14,5- 16,5	31,1
Pertumbuhan Impor Nonmigas (%)	8,0-9,0	14,0-15,6	16,0-17,5	17,0-18,3	18,0- 19,0	39,3

Cadangan Devisa (US\$ Miliar)	74,7-75,6	82,4-84,1	89,6-92,0	96,1-99,2	101,4- 105,5	96,2
Keuangan Negara *)						
Surplus/Defisit APBN/PDB (%)	-1,6	-1,9	-1,6	-1,4	-1,2	-0,6
Penerimaan Pajak /PDB (%)	12,4	12,6	13	13,6	14,2	11,6
Stok Utang Pemerintah / PDB(%)	29	28	27	25	24	26,1
Pengangguran dan Kemiskinan						
Tingkat Pengangguran (%)	7,6	7,3-7,4	6,7-7,0	6,0-6,6	5,0-6,0	7,1
Tingkat Kemiskinan (%)	12,0-13,5	11,5-12,5	10,5-11,5	9,5-10,5	8,0-10,0	13,3

Sumber: Bappenas

RPJMN menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 6,3-6,8 persen per tahun pada periode 2010-2014. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, dibutuhkan peningkatan penanaman modal (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) sebesar rata-rata 9,1 – 10,8 persen per tahun. Dengan asumsi inflasi pada kisaran 5 persen, kebutuhan penanaman modal (PMTB) atas harga berlaku meningkat dari Rp 2.065,2 triliun tahun 2010 menjadi Rp 3.958,6 triliun di tahun 2014.

Tabel 3.2

Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral 2010 – 2014 (dalam persen)

	Proyeksi Jangka Menengah RPJMN 2010-2014						Realisasi
	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata 2010 - 2014	2010
Pertumbuhan Ekonomi	5,5-5,6	6,0-6,3	6,4-6,9	6,7-7,4	7,0-7,7	6,3-6,8	6,1
Sisi Pengeluaran							
Konsumsi Masyarakat	5,2-5,2	5,2-5,3	5,3-5,4	5,3-5,4	5,3-5,4	5,3-5,4	4,6

Konsumsi Pemerintah	10,8-10,9	10,9-11,2	12,9-13,2	10,2-13,5	8,1-9,8	10,6-11,7	6,4
Investasi	7,2-7,3	7,9-10,9	8,4-11,5	10,2-12,0	11,7-12,1	9,1-10,8	8,5
Ekspor Barang dan Jasa	6,4-6,5	9,7-10,6	11,4-12,0	12,3-13,4	13,5-15,6	10,7-11,6	14,9
Impor Barang dan Jasa	9,2-9,3	12,7-15,2	14,3-15,9	15,0-16,5	16,0-17,4	13,4-14,9	17,3
Sisi Produksi							
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	3,3-3,4	3,4-3,5	3,5-3,7	3,6-3,8	3,7-3,9	3,6-3,7	2,9
Pertambangan dan Penggalian	2,0-2,1	2,1-2,3	2,3-2,4	2,4-2,5	2,5-2,6	2,2-2,4	3,5
Industri Pengolahan	4,2-4,3	5,0-5,4	5,7-6,5	6,2-6,8	6,5-7,3	5,5-6,0	4,5
Listrik, Gas & Air	13,4-13,5	13,7-13,8	13,8-13,9	13,9-14,0	14,1-14,2	13,8-13,9	5,3
Konstruksi	7,1-7,2	8,4-8,5	8,8-9,3	8,9-10,1	9,1-11,1	8,4-9,2	7,0
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	4,0-4,1	4,2-4,8	4,4-5,2	4,5-6,4	4,6-6,6	4,3-5,4	8,7
Pengangkutan dan Telekomunikasi	14,3-14,8	14,5-15,2	14,7-15,4	14,9-15,6	15,1-16,1	14,7-15,4	13,5
Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan	6,5-6,6	6,6-6,7	6,8-7,0	6,9-7,0	7,2-7,3	6,8-6,9	5,7
Jasa-jasa	6,7-6,9	6,9-7,0	7,0-7,1	7,1-7,2	7,2-7,4	6,9-7,1	6,0

Sumber: Bappenas

Sejalan dengan membaiknya perekonomian, peran kegiatan formal dalam perekonomian akan meningkat baik sumbangan terhadap PDB maupun penciptaan lapangan kerja. Sejalan dengan hal tersebut serta membaiknya pelayanan penanaman modal melalui penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal serta SPIPISE, semakin banyak kegiatan penanaman modal yang tercatat.

Tabel 3.3
Sasaran Penanaman Modal Renstra 2010 – 2014

	Realisasi	Realisasi	Proyeksi					2005-2009
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2010-2014	
Produk Domestik Bruto Harga Berlaku (Rp Triliun)	5.603,9	6.422,9	7.312,4	8.192,4	9.160,3	10.280,9	41.368,9	22.915,5
PMTB harga berlaku (Rp Triliun)	1.744,4	2.065,2	2.458,0	2.874,8	3.349,0	3.958,6	14.705,6	5.522,9
Realisasi Penanaman Modal	135,1	208,5	240,0	283,5	390,3	506,9	1.629,2	617,2
PMDN (Rp Triliun)	37,8	60,6	62,8	76,7	117,7	177,9	495,7	144,4
PMA (Rp Triliun)	97,3	147,9	177,2	206,8	272,6	329,0	1.133,5	472,8
PMA (US\$ miliar)	10,4	15,7	18,9	22,0	29,0	35,0	120,6	50,9

Asumsi: US\$1 = Rp9.400

Sumber: Pusdatin BKPM

Berbagai langkah untuk menghilangkan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal, semakin kondusifnya kondisi ekonomi makro serta semakin berfungsi dan efisiennya kinerja lembaga keuangan akan meningkatkan realisasi penanaman modal, salah satu indikatornya adalah terlampauinya target realisasi PMA dan PMDN di tahun 2010. Pada tahun 2010 kontribusi realisasi PMDN terhadap total penanaman modal sebesar 29,1% (Rp 60,5 triliun), lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2009 hanya sebesar 28,0 % (Rp 37,8 triliun).

Pada tahun 2010 terjadi peningkatan yang sangat signifikan atas nilai realisasi PMDN dan PMA dibanding tahun 2009. Realisasi PMDN tahun 2010 (Rp 60,6 triliun) meningkat sebesar 37,6% terhadap nilai PMDN di tahun 2009 (Rp 37,8 triliun). Demikian juga dengan realisasi PMA tahun 2010, yang

meningkat sebesar 34,2% (Rp 147,9 triliun) dibandingkan dengan tahun 2009 (Rp 97,3 triliun). Nilai realisasi penanaman modal Indonesia untuk periode 2010-2014 semula diproyeksikan pada Renstra BKPM 2010-2014 sekitar Rp 1.544,4 triliun. Dengan naiknya nilai realisasi PMDN dan PMA di tahun 2010, selanjutnya dilakukan revisi target penanaman modal di 2011 semula Rp 203,7 triliun menjadi Rp 240,0 triliun, sehingga proyeksi target penanaman modal 2010-2014 berubah menjadi Rp 1.629,2 triliun.

Dari total nilai realisasi PMDN dan PMA sebesar Rp 208,5 triliun, sekitar 67,1% merupakan nilai yang dihasilkan dari kegiatan penanaman modal di keenam provinsi di Pulau Jawa, dimana 32,9% sisanya berasal dari kegiatan penanaman modal di luar Pulau Jawa. Angka ini merupakan peningkatan dari tahun 2009, dimana 81,5% nilai realisasi PMDN dan PMA masih berasal dari berbagai kegiatan penanaman modal yang dilakukan di Pulau Jawa. Dengan perkembangan yang ada selama ini, realisasi PMDN dan PMA diproyeksikan semakin tersebar ke berbagai wilayah di luar Pulau Jawa, dimana angka persebaran PMDN dan PMA di wilayah ini dapat mencapai 40% dari total nilai realisasi PMDN dan PMA di tahun 2014. Rincian proyeksi gambaran persebaran realisasi PMDN dan PMA 2010-2014 berdasarkan provinsi dapat dilihat dalam Lampiran IV.

Meningkatnya realisasi penanaman modal sebagaimana diuraikan di atas di sisi lain juga mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Realisasi penyerapan tenaga kerja baru di tahun 2010 sebanyak 462.671 orang, dimana yang diserap oleh PMDN sebanyak 132.727 orang dan oleh PMA sebanyak 329.944 orang. Tahun 2014, diproyeksikan akan terjadi kenaikan penyerapan tenaga kerja menjadi sebanyak 1.260.385 orang, dimana yang diserap oleh PMDN sebanyak 560.385 orang dan oleh PMA sebanyak 700.000 orang. Persebaran penyerapan tenaga kerja diharapkan akan mengikuti persebaran realisasi PMDN dan PMA di periode yang sama. Adapun rincian proyeksi gambaran penyerapan tenaga kerja PMDN dan PMA Tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Tabel 3.4. Sedangkan, rincian proyeksi gambaran persebaran penyerapan tenaga kerja baru 2010-2014 berdasarkan provinsi dapat dilihat dalam Lampiran V.

Tabel 3.4
Proyeksi gambaran penyerapan tenaga kerja
PMDN dan PMA Tahun 2011-2014

	Realisasi	Proyeksi				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010-2014
Lapangan Kerja Baru (Orang)	462.671	574.841	681.605	950.755	1.260.385	3.930.257
PMDN (Orang)	132.727	197.820	241.605	370.755	560.385	1.503.292
PMA (Orang)	329.944	377.021	440.000	580.000	700.000	2.426.965

Asumsi:

PMDN per 1 Triliun = 3.150 lapangan kerja baru

PMA per US\$ 1 miliar = 20.000 lapangan kerja baru

Sumber: Pusdatin BKPM

BAB IV

PENUTUP

Peningkatan daya saing nasional seyogyanya menjadi gerakan nasional yang harus dirancang dan diimplementasikan secara sistematis. Seluruh komponen bangsa harus menyadari pentingnya daya saing nasional dalam menghadapi situasi dan arus global yang semakin mempengaruhi kekuatan-kekuatan perekonomian domestik. Kesadaran dan kesatuan pandangan diperlukan dari segenap pemangku kepentingan di pemerintahan, akademisi, maupun praktisi ekonomi dalam menentukan langkah-langkah konkrit. Semangat koordinasi dan harmonisasi hendaknya menjadi kekuatan yang mampu mengesampingkan kepentingan kelompok, sektoral, maupun kewilayahan, yang melandasi penyusunan Renstra BKPM 2010-2014. Renstra ini menjadi bagian penting dari prioritas pembangunan dalam RPJMN 2010-2014, yang merupakan tahapan kedua menuju arah pencapaian daya saing nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Bidang penanaman modal memiliki kepentingan dan prioritas tinggi terhadap daya saing nasional. Arah pencapaian visi pewujudan daya saing penanaman modal membutuhkan kesatuan pandangan segenap pemangku kepentingan untuk melangkah bersama dan menghindari tarikan-tarikan sektoral maupun kewilayahan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu strategi yang tertuang dalam Rencana Strategis BKPM yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan BKPM dalam meningkatkan daya saing di bidang penanaman modal.

Renstra BKPM 2010-2014 sebagai acuan tugas kelembagaan BKPM mengalami perubahan dikarenakan perubahan target peningkatan realisasi serta persebaran penanaman modal, dan adanya peran baru BKPM dalam memfasilitasi percepatan pembangunan infrastruktur dengan skema KPS. Perubahan Renstra BKPM 2010-2014 mencakup perubahan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja, yang seluruhnya ditujukan untuk penguatan kelembagaan penanaman modal dalam pencapaian target realisasi penanaman modal.

Penguatan kelembagaan penanaman modal sangat dibutuhkan, karena hanya dengan cara demikian agenda peningkatan daya saing penanaman modal dapat dilakukan secara efektif. Karena pertimbangan ini pula, BKPM menyampaikan perubahan Rencana Strategis 2010-2014 untuk memperluas kapasitas kelembagaan dalam mendukung tugas dan fungsi koordinasi kebijakan di bidang penanaman modal.

LAMPIRAN II
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010 - 2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKPM					
Kegiatan Prioritas					
- Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIISE). (Prioritas Nasional)	Meningkatnya kualitas pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik/Online (SPIISE)	1. Peningkatan jumlah aplikasi perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang BKPM, PTSP Provinsi, PTSP Kabupaten/Kota yang terbangun dalam SPIISE	Perijinan di 3 sektor	Tambahan perijinan di 2 sektor	Pusat Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
		2. Jumlah peningkatan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terhubung dalam SPIISE	40 Kab/Kota dan 33 Provinsi	60 Kab/Kota	

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
- Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pengkoordinasian pendidikan dan pelatihan bagi aparatur	3. Terbangunnya infrastruktur dan database penanaman modal yang terintegrasi	Penambahan kapasitas dan kemampuan infrastruktur pada jaringan BKPM	Tersedianya perangkat keras dan jaringan pada PTSP Provinsi dan Kab/Kota	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
		4. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti sosialisasi & pelatihan	50 Kab/Kota dan 33 Provinsi	60 Kab/Kota	
		5. Membangun Data Recovery Center (DRC)	-	-	
		Jumlah aparatur BKPM yang mengikuti Diklat Struktural, Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan tenaga kediklatan serta jumlah kurikulum dan modul diklat	2579 orang aparatur pusat dan daerah serta 10 modul	2000 orang, terdiri dari : 1395 orang aparatur Pusat dan 605 orang aparatur Daerah dan 19 modul	

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
- Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas pelayanan, pertimbangan dan bantuan hukum serta penyelesaian kasus/ sengketa di bidang penanaman modal	Jumlah pelaksanaan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal secara efisien efektif	-Pelayanan konsultasi hukum penanaman modal sejumlah 48 kali dan penanganan permasalahan dan bantuan hukum penanaman modal di dalam dan di luar pengadilan sejumlah 18 kasus/kegiatan	-Pelayanan konsultasi hukum penanaman modal sejumlah 40 kali dan penanganan permasalahan dan bantuan hukum penanaman modal di dalam dan di luar pengadilan sejumlah 22 kasus/kegiatan	Pusat Bantuan Hukum
Kegiatan Lainnya					
- Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran BKPM	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi program dan anggaran	1 Jumlah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BKPM dan Rencana Kerja BKPM	39 DIPA	39 DIPA	Biro Perencanaan Program dan Anggaran

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
	BKPM	2 Jumlah Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan BKPM di Dalam maupun di Luar Negeri	1 Laporan	1 Laporan	
- Penyempurnaan Produk Hukum Penanaman Modal Serta Peningkatan Pelayanan Hubungan Masyarakat, Keprotokolan dan Tata Usaha Pimpinan	Meningkatnya kualitas penyusunan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan serta urusan hubungan masyarakat, urusan keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan	1. Jumlah peraturan perundang-undangan yang dihimpun terkait dengan penanaman modal	90%	4 buku himpunan peraturan perundang-undangan	Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat Dan Tata Usaha Pimpinan
		2. Jumlah kegiatan kehumasan	80%	- 36 kali Weekly Report tentang berita penanaman modal - 25 kali Media Gathering - 4 kali Press Conference	
		3. Persentase tercapainya ketepatan waktu pelaksanaan urusan	70%	80%	

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
		keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan			
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas kelembagaan penanaman modal	Persentase terlaksananya administrasi kelembagaan dan terawatnya sarana dan prasarana kerja	- 4 jenis administrasi (Keuangan, TU, Kepegawaian, Perlengkapan & Rumah Tangga) - Terawatnya sarana dan prasarana kerja 100%	- 4 jenis administrasi (Keuangan, TU, Kepegawaian, Perlengkapan & Rumah Tangga) - Terawatnya sarana dan prasarana kerja 100%	Biro Umum
- Pengawasan / Pemeriksaan Fungsional Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan BKPM	Meningkatnya kualitas pengawasan dan laporan hasil pengawasan / pemeriksaan fungsional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan (LHP) Fungsional yang berkualitas dan tepat waktu	22 Laporan	34 Laporan	Inspektorat

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
- Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya penyebaran Laporan Perkembangan Penanaman Modal di dalam dan luar negeri	Jumlah laporan Perkembangan Penanaman Modal	12 Laporan	4 Laporan	Pusat Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BKPM					
Kegiatan Prioritas					
- Peningkatan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan	Persentase tercapainya peningkatan sarana dan prasarana kerja di pusat dan daerah	100%	100%	Biro Umum
PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL					
Kegiatan Prioritas					

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal. (Prioritas Nasional)	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal di pusat dan di daerah	1. Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal	Peserta 2000 orang terdiri dari 4 jenis pelatihan: Dasar, Lanjutan I, Lanjutan II, dan SPIPISE (*)	Peserta 2000 orang terdiri dari 4 jenis pelatihan: Dasar, Lanjutan I, Lanjutan II, dan SPIPISE	Direktorat Wilayah IV
		2. Penetapan Kualifikasi Kelembagaan PTSP di Bidang Penanaman Modal	265 PTSP (*)	265 PTSP	
		3. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal	33 Prov + 30 kab/kota (*)	-	
		4. Sosialisasi perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal	33 Provinsi (*)	-	

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
		5. Fasilitas Penghubung di BKPM	19 instansi + 33 provinsi masing-masing 1 orang (*)	19 instansi + 33 Propinsi masing-masing 1 orang	
		6. Penyederhanaan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (<i>Streamlining</i> Bisnis Proses Perizinan dan Nonperizinan)	3 Instansi (*)	-	
- Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	Meningkatnya kualitas Pemetaan & Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	1. Jumlah pedoman arah kebijakan umum perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya	1 pedoman arah kebijakan PM	3 pedoman arah kebijakan penanaman modal	Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
		2. Jumlah kajian perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya	1 kajian sektor baru dan 1 kajian sektor <i>Up-Dating</i>	3 kajian sektor dan 1 laporan fasilitasi penanaman modal	
		3. Jumlah kajian perencanaan insentif penanaman modal di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya	1 kajian perencanaan insentif penanaman modal	1 kajian perencanaan	
		4. Jumlah buku pedoman tentang Norma, Standar dan Prosedur yang Baku dalam melakukan	1 buku pedoman NSP perencanaan PM	-	

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
- Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur	Meningkatnya kualitas Pemetaan & Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur	1. Jumlah pedoman arah kebijakan perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri manufaktur	1 pedoman arah kebijakan penanaman modal	Sosialisasi dan fasilitasi pedoman arah kebijakan penanaman modal (lanjutan)	Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur
		2. Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri manufaktur	1 kajian sektor baru dan 1 kajian sektor <i>Up-Dating</i>	3 paket buku kajian perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri manufaktur	

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
		Perencanaan Penanaman Modal di Pusat dan di Daerah di Sektor Agribisnis & Sumber Daya Alam lainnya			
		3. Jumlah kajian Perencanaan Insentif Penanaman Modal di Sektor Industri Manufaktur	1 kajian perencanaan insentif penanaman modal	1 kajian perencanaan insentif penanaman modal	
		4. Jumlah buku pedoman tentang Norma, Standar dan Prosedur yang Baku dalam melakukan Perencanaan Penanaman Modal di Pusat dan di Daerah di Sektor Industri Manufaktur	1 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal	-	

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
- Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan	Meningkatnya kualitas Pemetaan & Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan	1. Jumlah pedoman arah kebijakan perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor jasa dan kawasan	1 pedoman	-	Direktorat Perencanaan Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan
		2. Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor jasa dan kawasan	1 kajian baru dan <i>updating</i>	1 kajian baru dan 1 <i>updating</i>	
		3. Jumlah kajian Perencanaan Insentif Penanaman Modal di sektor Jasa dan Kawasan	1 kajian	1 kajian	

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
		4. Jumlah buku pedoman tentang Norma, Standar dan Prosedur Baku dalam melakukan Perencanaan Penanaman Modal di Pusat dan di Daerah di sektor Jasa dan Kawasan	1 buku pedoman NSP perencanaan Penanaman Modal / <i>Updating</i>	-	
- Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). (Prioritas Nasional)	Terbangunnya KEK di 5 lokasi	1. Hasil Koordinasi masalah strategis di bidang pengembangan KEK	1 buku laporan	1 buku laporan	Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan
		2. Jumlah promosi penanaman modal di KEK	2 Negara & 3 Daerah	5 Negara & 5 daerah	
		3. Kerja sama di bidang pengembangan KEK	-	2 Negara	
- Peningkatan Dereglulasi Kebijakan Penanaman Modal. (Prioritas	Merealisasikan kegiatan kajian analisis kebijakan dan kegiatan	1. Jumlah rumusan untuk bahan pertimbangan penyusunan rumusan	1 rekomendasi	1 rekomendasi	Direktorat Dereglulasi Penanaman Modal

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
Nasional)	sosialisasi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan daya saing	kebijakan penanaman modal			
		2. Jumlah rumusan kebijakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kebijakan dan pengembangan penanaman modal yang berdaya saing	1 rumusan	1 rumusan	
		3. Jumlah kegiatan dan peserta sosialisasi kebijakan penanaman modal	55 kegiatan	52 kegiatan	
- Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah	Merealisasikan kegiatan identifikasi pemetaan dan pengembangan	1. Jumlah Informasi data potensi daerah yang mutakhir yang didokumentasikan secara elektronik	33 Prov	33 provinsi	Direktorat Pengembangan Potensi Daerah

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
	potensi yang diarahkan bagi peningkatan penanaman modal di daerah	2. Jumlah kegiatan dan peserta workshop pengembangan potensi daerah dan sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Sosialisasi 5 Daerah dan Workshop 4 Daerah	Sosialisasi 3 Daerah dan Workshop 5 Daerah	
		3. Jumlah hasil Kajian dan pemetaan tentang potensi daerah serta pengembangan potensi wilayah investasi dan pengembangan industri	1 hasil kajian 10 peta potensi daerah (mendalam) dan 23 peta potensi daerah secara umum	1 Laporan Kajian 15 Peta Potensi Daerah	
- Pemberdayaan Usaha Nasional	Merealisasikan kegiatan fasilitasi kemitraan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pemberdayaan usaha nasional	1. Jumlah pelaksanaan Forum Komunikasi Pemberdayaan Usaha Nasional	5 Lokasi	5 Lokasi	Direktorat Pemberdayaan Usaha
		2. Jumlah pelaksanaan <i>Matchmaking</i> di Dalam dan Luar Negeri	4 Lokasi 5 Negara	4 Lokasi 4 Negara	

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
- Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas pengembangan strategi promosi yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	3. Jumlah pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan UMKMK	5 Lokasi	4 Lokasi	Direktorat Pengembangan Promosi
		4. Jumlah hasil Kajian Peningkatan Partisipasi UMKM	1 Set	1 Set	
		1. Pemetaan kebijakan, insentif dan potensi penanaman modal negara target dan negara pesaing	180 target investor potensial (12 negara)	250 target investor potensial (1 laporan)	
		2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Promosi Investasi	17 laporan	35 Laporan	
		3. Sarana promosi penanaman modal yang efektif dengan pengembangan	Penyelenggaraan <i>The Indonesian Investment</i>	Penyelenggaraan <i>The Indonesian Investment Promotion Center</i>	

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
- Promosi Penanaman Modal Sektoral Terpadu dan Terintegrasi di Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya kualitas promosi penanaman modal sektoral terpadu yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	kantor perwakilan BKPM di luar negeri (IIPC/Indonesian Investment Promotion Center)	Promotion Center (IIPC) di 6 negara	(IIPC) di 8 negara	Direktorat Promosi Sektoral
		1. Penyelenggaraan kegiatan promosi terpadu berdasarkan sektor dan negara	16 kegiatan	22 Kegiatan	
		2. Penyelenggaraan Marketing Investasi Indonesia yang mengikutsertakan partisipasi Stakeholder di Tingkat Pusat dan Daerah	5 kegiatan	5 Kegiatan	
		3. Kegiatan Rebranding Investasi Indonesia melalui Media Internasional	3 media	5 Media	

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
- Fasilitasi Daerah Dalam Rangka Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas fasilitasi promosi daerah yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	1. Jumlah fasilitasi promosi daerah	33 daerah	33 daerah	Direktorat Fasilitasi Promosi Daerah
		2. Jumlah fasilitasi pelayanan penerimaan misi penanam modal luar negeri di pusat dan di daerah tempat tujuan rencana penanaman modal	misi investasi 33 kali di pusat dan daerah	Misi Investasi 45 kali di pusat dan daerah	
		3. Jumlah pelayanan pendampingan misi pusat dan daerah ke negara potensial penanam modal di berbagai sektor usaha	promosi investasi di 6 negara	Promosi investasi di 15 negara	

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
		4. Jumlah kegiatan promosi penanaman modal daerah di dalam negeri antara lain Talkshow, Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID), Seminar Investasi (<i>Business Meeting, Match Making, One on One Meeting</i>)	6 kali TalkShow di TV Nasional, 2 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) di Jawa Timur dan Sulawesi Utara, 2 kali Seminar Investasi di Jawa Timur dan Sulawesi Utara (<i>Business Meeting, Matchmaking, One-on-One Meeting</i>)	8 kali TalkShow di TV Nasional, 3 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) di Batam, Maluku dan NTT, 3 kali Seminar Investasi di Batam, Maluku dan NTT (<i>Business Meeting, matchmaking, One-on-One Meeting</i>)	

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
		5. Jumlah kegiatan promosi penanaman modal daerah di luar negeri antara lain Marketing Investasi Indonesia (MII) dan <i>Trade, Tourism and Investment (TTI) Forum, Joint Promotion</i> antara Pusat dan Daerah, <i>Joint Promotion</i> antar Instansi Pusat (Instansi Penanaman Modal Pusat dengan Instansi-instansi Sektor dan lembaga-lembaga terkait)	Terfasilitasinya PDPPM/PDKPM dalam kegiatan MII di 3 negara dan TTI di 6 negara	Terfasilitasinya PDPPM/PDKPM dalam kegiatan MII di 3 negara dan TTI di 6 negara	

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
- Penyelenggaraan Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal untuk Kegiatan di Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	1. Informasi potensi penanaman modal, antara lain profil proyek, brosur, leaflet, <i>Indonesia Investment News</i> , <i>Guide for Investor</i> , <i>Investment Procedures</i> , film, video, slide, CD ROM dan multimedia/situs web	1000 eksemplar brosur/leaflet, 6500 eksemplar <i>Brief Guide for Investment</i> , 15000 eksemplar <i>Investment Procedures</i> dan buku-buku peraturan, media elektronik.	190.000 eksemplar brosur, 35.000 eksemplar <i>Brief Guide for Investment</i> , 3.000 usb flasdisk, 1 video promosi, 1 website	Direktorat Pameran dan Sarana Promosi
		2. Jumlah kegiatan pameran baik di dalam maupun di luar negeri.	9 pameran di dalam negeri dan 15 pameran di luar negeri	14 Pameran di dalam negeri dan 14 pameran di luar negeri	
		3. Penyusunan revitalisasi strategi promosi dalam rangka Branding Investasi Indonesia	-	1 buku laporan	

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
- Kerjasama Bilateral dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal	Meningkatnya strategi dan teknik yang berdaya saing untuk memperoleh manfaat yang optimal dari perundingan-perundingan kerjasama bilateral dan multilateral dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan di bidang penanaman modal	4. Forum pertemuan berskala internasional (FORBES CEO Conference)	-	1 kegiatan	Direktorat Kerjasama Bilateral dan Multilateral
		5. Penayangan dan diseminasi materi iklan promosi investasi	-	2 media	
- Kerjasama Bilateral dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal	Meningkatnya strategi dan teknik yang berdaya saing untuk memperoleh manfaat yang optimal dari perundingan-perundingan kerjasama bilateral dan multilateral dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan di bidang penanaman modal	1. Jumlah laporan partisipasi aktif BKPM dalam fora perundingan kerjasama bilateral dan multilateral	23 Laporan	28 Laporan	Direktorat Kerjasama Bilateral dan Multilateral
		2. Jumlah laporan bahan posisi perundingan dalam rangka kerjasama bilateral dan multilateral	4 Laporan	28 Laporan	

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
- Kerjasama Regional di Bidang Penanaman Modal	Meningkatnya strategi dan teknik yang berdaya saing untuk memperoleh manfaat yang optimal dari perundingan-perundingan kerjasama regional dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan di	3. Jumlah laporan koordinasi internal dan eksternal dalam kerangka kerjasama pengembangan ekonomi wilayah tertentu	2 Laporan	6 Laporan	Direktorat Kerjasama Regional
		4. Jumlah peserta sosialisasi hasil-hasil perundingan bilateral dan multilateral	120 Orang	120 Orang	
		1. Jumlah laporan partisipasi aktif BKPM dalam fora perundingan kerjasama regional.	30 Laporan	33 Laporan	
		2. Jumlah laporan bahan posisi perundingan dalam rangka kerjasama regional	33 Laporan	33 Laporan	
		3. Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan Seknas KESR.	1 Laporan	-	

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
	bidang penanaman modal	4. Jumlah peserta sosialisasi hasil-hasil perundingan kerjasama regional	180 Orang	220 orang	
		5. Penyelenggaraan <i>Senior Official Meeting (SOM)/Ministerial Meeting (MM)</i> di Indonesia	-	-	
- Kerjasama dengan Dunia Usaha Asing di Dalam dan di Luar Negeri di Bidang Penanaman Modal	Meningkatnya strategi dan teknik yang berdaya saing untuk memperoleh manfaat yang	1. Jumlah partisipasi aktif BKPM dalam pertemuan / perundingan dengan dunia usaha	30 kali	15 laporan	Direktorat Kerjasama Dunia Usaha Internasional

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
	optimal dari perundingan-perundingan kerjasama dunia usaha internasional	2. Jumlah laporan pendataan penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia dan sosialisasinya kepada instansi terkait	1 laporan	1 laporan	
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Persetujuan Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan surat persetujuan penanaman modal	1. Jumlah persetujuan yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu	100%	5000 persetujuan	Direktorat Pelayanan Aplikasi
		2. Jumlah kunjungan dalam rangka pemberian konsultasi (advising) mengenai pelayanan aplikasi pada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	100%	23 kali	

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
		3. Jumlah kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tentang tata cara pelayanan penerbitan surat persetujuan penanaman modal bagi aparaturnya pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota serta dunia usaha	100%	1 kali	
		4. Jumlah pedoman penilaian permohonan penanaman modal	1 (satu) buah buku pedoman	1 (satu) buah buku pedoman	
		5. Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparaturnya pelaksanaan penanaman modal	90%	12 kali	

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	1. Jumlah perizinan yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu	100%	1200 perizinan	Direktorat Pelayanan Perizinan
		2. Jumlah kunjungan dalam rangka pemberian konsultasi (advising) mengenai pelayanan perizinan pada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	100%	3 kali	
		3. Jumlah kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tentang tata cara pelayanan perizinan penanaman modal bagi aparaturnya pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota serta dunia usaha	100%	1 kali	

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
		4. Jumlah pedoman penilaian permohonan penanaman modal	1 (satu) buah buku laporan	1 (satu) buah buku laporan	
		5. Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal	100%	22 kali	
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal	1. Jumlah fasilitas penanaman modal yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu	100%	640 persetujuan	Direktorat Pelayanan Fasilitas
		2. Jumlah partisipasi instansi sektoral dan daerah dalam pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	100%	5 daerah	

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
		3. Jumlah kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tentang tata cara pelayanan fasilitas penanaman modal bagi aparat pemerintah propinsi dan kabupaten atau kota serta dunia usaha	5 kali	6 kali terdiri dari : Harmonisasi (1 daerah) dan FGD (5 kali)	
		4. Jumlah pedoman penilaian permohonan penanaman modal	2 pedoman	1 pedoman	
		5. Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparat pelaksana pelayanan penanaman modal	6 Materi	10 materi (Dalam Negeri dan Luar Negeri)	

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I	Mendorong realisasi penanaman modal di Sumatera	1. Jumlah/nilai realisasi penanaman modal yang terpantau	1500 Proyek	76,03 Triliun (15% dari 506,9 Triliun)	Direktorat Wilayah I
		2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi penanam modal antara lain dengan instansi terkait, masyarakat sekitar lokasi proyek, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan	10 daerah	10 daerah	
		3. Jumlah daerah yang mendapatkan pengawasan mengenai pelaksanaan ketentuan penanaman modal	200 Perusahaan	10 daerah	

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
		4. Pemberian penghargaan investasi dan pelayanan Penanaman Modal kepada Propinsi atau Kabupaten/Kota serta perusahaan PMA/PMIDN	-	1 paket	
- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II	Mendorong realisasi penanaman modal di Kalimantan, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta	1. Jumlah/nilai realisasi penanaman modal yang terpantau	6000 Proyek	151,8 Triliun (30% dari 506,9 Triliun)	Direktorat Wilayah II
		2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi penanam modal antara lain dengan instansi terkait, masyarakat sekitar lokasi proyek,	6 daerah	6 daerah	

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
		lingkungan hidup dan ketenagakerjaan			
		3. Jumlah daerah yang mendapatkan pengawasan mengenai pelaksanaan ketentuan penanaman modal	240 Perusahaan	6 daerah	
		4. Penyelenggaraan Konsolidasi Realisasi Penanaman Modal antara BKPM dan PDPPM	-	-	
		5. Terselenggaranya workshop LKPM secara online bagi perusahaan PM	-	-	
		6. Publikasi pengumuman kewajiabn perusahaan PM	-	-	

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
		7. Terselenggaranya pertemuan koordinasi pimpinan BKPM dengan Pemda	-	-	
		8. Fasilitas komitmen setiap perusahaan yang menyatakan minat untuk berinvestasi di Indonesia	-	-	
		9. Interkoneksi database realisasi investasi nasional	-	-	
		10. Penyediaan sarana data realisasi investasi di Provinsi dan Kab/Kota yang terhubung dengan database SPIPISE	-	-	
		1. Jumlah/nilai realisasi penanaman modal yang terpantau	4000 Proyek	177,4 Triliun (35% dari 506,9 Triliun)	
- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III	Mendorong realisasi penanaman modal di Jawa Barat, Banten, Jawa				Direktorat Wilayah III

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
	Tengah dan Sulawesi				
		2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi penanam modal antara lain dengan instansi terkait, masyarakat sekitar lokasi proyek, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan	9 daerah	9 daerah	
		3. Jumlah daerah yang mendapatkan pengawasan mengenai pelaksanaan ketentuan penanaman modal	400 perusahaan	9 daerah	

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	Mendorong realisasi penanaman modal di Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat	1. Jumlah/nilai realisasi penanaman modal yang terpantau	1550 proyek	101,38 Triliun (20% dari 506,9 Triliun)	Direktorat Wilayah IV
		2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi penanam modal antara lain dengan instansi terkait, masyarakat sekitar lokasi proyek, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan	8 daerah	8 daerah	
		3. Jumlah daerah yang mendapatkan pengawasan mengenai pelaksanaan	200 perusahaan	8 daerah	

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
		ketentuan penanaman modal			
		4. Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasinya di seluruh Kabupaten/Kota pada 32 provinsi dalam rangka dekonsentrasi	-	32 Provinsi	
- Fasilitas Percepatan Investasi Kerjasama Pemerintah Swasta	Informasi Potensi Investasi dan Fasilitas Proyek Strategis Nasional di Bidang Infrastruktur	1. Usulan masterplan proyek infrastruktur dengan skema KPS	-	Masterplan 5 proyek infrastruktur dengan skema KPS	Direktorat Perencanaan Infrastruktur
		2. Jumlah perencanaan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	-	1 paket perencanaan investasi infrastruktur mendukung koridor ekonomi Indonesia	

KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
		3. Jumlah fasilitas percepatan pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur	-	Fasilitas 5 proyek infrastruktur yang siap ditawarkan kepada investor	
		4. Sistem informasi peta investasi di sektor infrastruktur	-	sistem informasi peta investasi di sektor infrastruktur	
		5. Jumlah kegiatan promosi infrastruktur terintegrasi	-	10 kegiatan	

Keterangan: (*) Tahun 2010 ketersediaan anggaran untuk kegiatan PTSP belum ditetapkan.

LAMPIRAN III
KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN				(dalam juta rupiah)
		2010	2011	2012	2013	
I.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM					
-	Penyempurnaan Produk Hukum Penanaman Modal Serta Peningkatan Pelayanan Hubungan Masyarakat, Keptokolan dan Tata Usaha Pimpinan	5,463.5	8,248.6	5,512.4	6,781.3	7,995.0
-	Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIRISE)	27,370.2	18,665.7	66,721.4	13,774.6	13,755.4
-	Pengembangan Sumber Daya Manusia	11,000.0	4,927.0	5,488.4	6,751.7	7,963.2
-	Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal	6,000.0	5,434.6	6,053.7	7,447.2	8,783.4
-	Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran BKPM	4,463.2	4,042.6	4,503.2	5,539.7	6,533.7
-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanaman Modal	102,454.9	107,406.7	106,000.0	120,646.0	127,533.2
-	Pengawasan / Pemeriksaan Fungsional Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan BKPM	5,000.0	4,528.8	5,044.8	6,206.0	7,319.5
-	Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	3,629.8	3,388.2	3,387.2	3,390.1	3,388.0
	Total Program I	165,381.6	156,642.2	202,711.1	170,536.6	183,274.4
II.	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur BKPM					
-	Pembangunan / pengadaan / peningkatan sarana dan prasarana	17,342.8	10,151.6	46,308.2	63,911.1	16,407.1
	Total Program II	17,342.8	10,151.6	46,308.2	63,911.1	16,407.1
III.	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal					
-	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal	0.0	20,875.0	87,229.4	33,766.0	33,879.3
-	Fasilitasi Percepatan Investasi Kerjasama Pemerintah Swasta	0.0	0.0	54,000.0	80,000.0	80,000.0
-	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Agribisnis & Sumber Daya Alam Lainnya	7,738.0	3,000.0	5,693.4	6,494.0	5,270.3
-	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur	5,837.4	3,600.0	6,389.7	7,245.4	8,545.4
-	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan	4,991.9	6,217.5	4,036.6	6,196.0	7,307.7
-	Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	1,200.0	2,086.9	2,324.7	4,599.9	7,814.0
-	Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal	18,737.8	14,878.1	15,573.2	20,388.1	24,046.3
-	Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah	6,597.5	5,975.8	6,656.6	8,188.9	9,658.2
-	Pemberdayaan Usaha Nasional	7,000.0	6,340.3	6,862.7	8,688.4	10,247.3
-	Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal	40,536.5	39,793.4	31,863.8	45,349.1	53,486.0
-	Promosi Penanaman Modal Sektor Terpadu dan Terintegrasi di Dalam dan Luar Negeri	72,156.9	95,096.1	27,532.4	40,020.7	47,201.5
-	Fasilitasi Daerah Dalam Rangka Kegiatan Promosi Penanaman Modal	19,300.0	13,611.7	16,446.0	20,231.6	23,861.6
-	Penyelenggaraan Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal untuk Kegiatan di Dalam dan di Luar Negeri	12,988.0	8,231.6	39,169.4	40,280.0	42,303.9
-	Kerjasama Bilateral dan Multilateral di bidang Penanaman Modal	4,007.7	3,630.0	4,043.6	4,974.3	5,866.9
-	Kerjasama Regional di Bidang Penanaman Modal	5,353.9	6,349.4	5,901.9	6,645.3	7,837.6
-	Kerjasama dengan Dunia Usaha Asing di Dalam dan di Luar Negeri di bidang Penanaman Modal	3,000.0	2,717.3	3,008.9	3,723.6	4,391.7
-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Persewaan Penanaman Modal	4,515.3	4,089.7	4,392.6	5,604.3	6,609.9
-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3,426.7	3,103.8	3,457.2	4,253.2	5,016.4
-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal	4,264.4	3,862.6	4,302.6	5,293.0	6,242.7
-	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I	6,119.8	8,188.8	8,667.3	8,667.3	9,819.9
-	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II	10,989.9	3,629.8	35,642.9	6,153.2	7,382.7
-	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III	6,621.7	3,238.4	7,288.7	7,947.9	9,536.0
-	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV*)	6,021.7	12,543.2	21,172.7	21,640.4	22,767.5
	Total Program III	245,938.3	268,990.4	401,178.0	396,350.6	439,092.8
	TOTAL KL	428,662.7	435,784.2	650,197.3	630,798.3	638,774.3

*) Termasuk Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 16 M untuk 32 provinsi

Catatan:

Tahun 2010 merupakan pagu definitif + APBN-P

Tahun 2011 merupakan pagu definitif

Tahun 2012 merupakan pagu indikatif

LAMPIRAN IV
RINCIAN PROYEKSI GAMBARAN PERSEBARAN REALISASI PENANAMAN MODAL 2010-2014
BERDASARKAN PROVINSI

PROVINSI	REALISASI				PROYEKSI				TARGET PENYEBARAN 2014
	2010	2011	2012	2013	2014	2010-2014	2014		
D.I ACEH	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,7	0,2	0,7	0,0%
SUMATERA UTARA	2,3	2,8	3,4	5,0	6,9	20,4	6,9	20,4	1,4%
SUMATERA BARAT	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	1,3	0,4	1,3	0,1%
RIAU	1,8	2,2	2,7	4,0	5,4	16,1	5,4	16,1	1,1%
JAMBI	0,6	0,7	0,8	1,2	1,7	5,0	1,7	5,0	0,3%
SUMATERA SELATAN	3,4	4,1	5,1	7,4	10,2	30,3	10,2	30,3	2,0%
BENGKULU	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	2,1	0,7	2,1	0,1%
LAMPUNG	0,6	0,7	0,8	1,2	1,6	4,9	1,6	4,9	0,3%
BANGKA BELITUNG	0,2	0,2	0,3	0,4	0,6	1,8	0,6	1,8	0,1%
KEPULAUAN RIAU	1,7	2,0	2,5	3,6	5,0	14,8	5,0	14,8	1,0%
SUMATRA	11,0	13,2	16,4	23,9	32,7	97,2	32,7	97,2	6,4%
DKI JAKARTA	63,2	71,5	81,9	109,3	137,4	463,4	137,4	463,4	27,1%
JAWA BARAT	31,2	35,3	40,5	54,0	67,8	228,9	67,8	228,9	13,4%
JAWA TENGAH	1,3	1,5	1,7	2,3	2,9	9,8	2,9	9,8	0,6%
DI YOGYAKARTA	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,1	0,4	0,0%
JAWA TIMUR	24,2	27,4	31,4	41,9	52,6	177,5	52,6	177,5	10,4%
BANTEN	19,9	22,6	25,8	34,5	43,3	146,1	43,3	146,1	8,5%
JAWA	140,0	158,4	181,4	242,0	304,1	1.026,0	304,1	1.026,0	60,0%
BALI	2,9	3,4	4,2	6,2	8,4	25,1	8,4	25,1	1,7%
NUSA TENGGARA BARAT	3,8	4,5	5,7	8,3	11,3	33,6	11,3	33,6	2,2%
NUSA TENGGARA TIMUR	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,3	0,0%
BALI & NUSA TENGGARA	6,7	8,0	10,0	14,5	19,8	59,0	19,8	59,0	3,9%
KALIMANTAN BARAT	2,7	3,2	4,1	5,9	8,1	24,0	8,1	24,0	1,6%
KALIMANTAN TENGAH	8,5	10,1	12,7	18,4	25,1	74,8	25,1	74,8	5,0%
KALIMANTAN SELATAN	3,9	4,6	5,7	8,4	11,4	34,0	11,4	34,0	2,3%

PROVINSI	REALISASI					PROYEKSI					
	2010	2011	2012	2013	2014	2010-2014	2014	2013	2012	2011	TARGET PENYEBARAN 2014
KALIMANTAN TIMUR	17,8	21,3	26,6	38,6	52,8	157,1					10,4%
KALIMANTAN	32,9	39,2	49,0	71,3	97,4	289,9					19,2%
SULAWESI UTARA	2,2	2,6	3,2	4,7	6,4	19,1					1,3%
SULAWESI TENGAH	1,4	1,7	2,1	3,1	4,2	12,5					0,8%
SULAWESI SELATAN	7,2	8,6	10,8	15,7	21,4	63,8					4,2%
SULAWESI TENGGARA	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	1,3					0,1%
GORONTALO	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2					0,0%
SULAWESI BARAT	1,2	1,4	1,8	2,6	3,5	10,4					0,7%
SULAWESI	12,2	14,5	18,1	26,4	36,0	107,2					7,1%
MALUKU	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2					0,0%
MALUKU UTARA	2,2	2,7	3,3	4,9	6,6	19,8					1,3%
MALUKU	2,3	2,7	3,4	4,9	6,7	20,0					1,3%
PAPUA	0,3	0,4	0,5	0,7	1,0	2,9					0,2%
IRIAN JAYA BARAT	3,1	3,6	4,6	6,6	9,1	26,9					1,8%
PAPUA	3,4	4,0	5,1	7,3	10,0	29,9					2,0%
NASIONAL	208,5	240,0	283,5	390,3	506,9	1.629,2					100,0%

Asumsi: US\$1 = Rp 9.400

LAMPIRAN V
RINCIAN PROYEKSI GAMBARAN PERSEBARAN PENYERAPAN TENAGA KERJA BARU 2010-2014
BERDASARKAN PROVINSI

PROVINSI	REALISASI				PROYEKSI			TOTAL 2010-2014	TARGET PENYEBARAN 2014
	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2014		
D.I ACEH	194	240	240	487	497	1.658	0,0%		
SUMATERA UTARA	8.504	6.706	8.174	12.180	17.157	52.721	1,4%		
SUMATERA BARAT	433	479	481	731	995	3.118	0,1%		
RIAU	14.333	5.269	6.491	9.744	13.427	49.265	1,1%		
JAMBI	5.599	1.677	1.923	2.923	4.227	16.349	0,3%		
SUMATERA SELATAN	11.757	9.820	12.262	18.026	25.362	77.227	2,0%		
BENGKULU	4791	719	962	1.218	1.741	9.430	0,1%		
LAMPUNG	22.845	1.677	1.923	2.923	3.978	33.347	0,3%		
BANGKA BELITUNG	12.261	479	721	974	1.492	15.928	0,1%		
KEPULAUAN RIAU	7.734	4.790	6.011	8.769	12.432	39.737	1,0%		
SUMATRA	88.451	31.616	39.430	58.219	81.307	298.779	6,5%		
DKI JAKARTA	34.797	171.255	196.908	266.250	341.639	1.010.849	27,1%		
JAWA BARAT	127.542	84.550	97.372	131.542	168.582	609.587	13,4%		
JAWA TENGAH	17527	3.593	4.087	5.603	7.211	38.020	0,6%		
DI YOGYAKARTA	2.265	240	240	244	249	3.237	0,0%		
JAWA TIMUR	22.881	65.628	75.493	102.067	130.788	396.857	10,4%		
BANTEN	73.270	54.131	62.030	84.041	107.664	381.135	8,5%		
JAWA	278.282	379.395	436.131	589.502	756.132	2.439.686	60,0%		
BALI	8.396	8.144	10.098	15.103	20.886	62.627	1,7%		
NUSA TENGGARA BARAT	6.374	10.778	13.704	20.218	28.097	79.172	2,2%		
NUSA TENGGARA TIMUR	260	0	240	244	249	993	0,0%		
BALI & NUSA TENGGARA	15.030	19.161	24.043	35.321	49.232	142.791	3,9%		

PROVINSI	REALISASI				PROYEKSI				TOTAL 2010-2014	TARGET PENYEBARAN 2014
	2010	2011	2012	2013	2014					
KALIMANTAN BARAT	4.070	7.665	9.857	14.372	20.140	56.104	1,6%			
KALIMANTAN TENGAH	24.350	24.191	30.534	44.822	62.410	186.307	5,0%			
KALIMANTAN SELATAN	10.366	11.018	13.704	20.462	28.346	83.896	2,2%			
KALIMANTAN TIMUR	29.001	51.017	63.953	94.028	131.285	369.284	10,4%			
KALIMANTAN	67.787	93.891	117.808	173.684	242.181	695.591	19,2%			
SULAWESI UTARA	570	6.227	7.694	11.449	15.913	41.888	1,3%			
SULAWESI TENGAH	501	4.072	5.049	7.551	10.443	28.457	0,8%			
SULAWESI SELATAN	1.453	20.598	25.966	38.245	53.210	141.505	4,2%			
SULAWESI TENGGARA	159	479	481	731	995	3.187	0,1%			
GORONTALO	0	0	0	244	249	492	0,0%			
SULAWESI BARAT	3.337	3.353	4.328	6.333	8.703	22.802	0,7%			
SULAWESI	6.020	34.730	43.517	64.309	89.512	238.332	7,1%			
MALUKU	30	0	0	244	249	522	0,0%			
MALUKU UTARA	652	6.467	7.934	11.936	16.411	43.400	1,3%			
MALUKU	682	6.467	8.174	11.936	16.659	43.922	1,3%			
PAPUA	6.388	958	1.202	1.705	2.486	12.740	0,2%			
IRIAN JAYA BARAT	31	8.623	11.060	16.077	22.627	58.417	1,8%			
PAPUA	6.419	9.581	12.262	17.783	24.865	71.157	2,0%			
NASIONAL	462.671	574.841	681.605	950.755	1.260.385	3.930.257	100,0%			

Asumsi:

PMDN per 1 Triliun = 3.150 lapangan kerja baru

PMA per US\$ 1 miliar = 20.000 lapangan kerja baru